

WARTA PENGAWASAN

KAWAL AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR 4 TAHUN 2023



SOROT EKONOMI & PRODUKTIVITAS

ISSN 0854-0519



Majalah Warta Pengawasan merupakan media informasi dan komunikasi di lingkungan aparat pengawasan serta sebagai sarana untuk memasyarakatkan konsep dan praktik pengawasan kepada seluruh lapisan masyarakat

Alamat Redaksi/Tata Usaha: Gedung BPKP
Pusat Lantai 1 Jalan Pramuka No. 33 Jakarta
Timur 13120 Tel/Fax. +6221-8591-0031,
pes 0102 dan 0103. Desain cover oleh:
Kominfo BPKP/Bintang A. Marta. Diterbitkan
Oleh: Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Berdasarkan:
Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep-
204/K/SU/2013 Tanggal 26 Maret 2013
STT Nomor: 958/SK/Ditjen PPG/STT/1982
Tanggal 20 April 1982, ISSN 0854-0519,
Homepage: www.bpkp.go.id - Email:
wartapengawasan@gmail.com. Dilarang
mengutip atau memproduksi seluruh atau
sebagian isi majalah tanpa seijin redaksi.

Majalah Warta Pengawasan dapat
di unduh melalui



EDITOR'S NOTE

*“Optimism is the faith that leads to achievement.
Nothing can be done without hope and confidence.” - Hellen Keller*

Kutipan seorang penulis, aktivis dan dosen di Amerika ini menjadi gambaran bagaimana optimisme, harapan dan keyakinan dapat mendorong kita untuk meraih keberhasilan. Masih ingat kah bagaimana di penghujung tahun 2022, diramalkan sepertiga ekonomi dunia mengalami resesi pada 2023? Dan situasi ekonomi Indonesia diprediksi beberapa lembaga akan terdampak resesi global? Belum lagi dampak perang Rusia dan Ukraina, serta risiko krisis energi, pangan, dan keuangan yang melanda dunia. Serta tidak lupa dengan perubahan iklim semakin parah, hingga mendorong pemerintahan di seluruh dunia untuk menerapkan pendekatan yang lebih berkelanjutan dalam perekonomiannya.

Tantangan-tantangan ekonomi yang membayangi selama tahun 2023 tentunya harus dihadapi dengan optimisme tinggi. Bukan dengan ketakutan dan kecemasan yang berlebihan. Namun, meskipun kondisi ekonomi dan sistem keuangan Indonesia sampai dengan saat ini dapat dikategorikan masih cukup baik, antisipasi dan kewaspadaan tentunya tetap dibutuhkan. Majalah Warta Pengawasan edisi ini akan membahas bagaimana perekonomian Indonesia selama tahun 2023. Dalam rubrik-rubrik majalah warta pengawasan kali ini, akan diulas tentang Pentingnya Perlindungan Sosial Adaptif dalam mengatasi *middle income trap* dalam rubrik *Governance Vantage Point*, Strategi Implementasi Kebijakan PBJ Berkelanjutan pada rubrik *Public Policy*, dan kolom ilmiah

yang menghadirkan Kajian Teoritis *Sustainable Finance* dalam Mengimplementasikan *Sustainable Development Goals*, serta rubrik-rubrik lain yang tidak kalah menarik.

Akhir kata, semoga majalah warta pengawasan edisi IV di penghujung tahun 2023 ini dapat menjadi bekal bermakna untuk pengetahuan bersama. Seperti Hellen Keller, yang merupakan perempuan tunanetra dan tunarungu yang bertekad baja, kita pun harus tetap optimis dan percaya diri dalam menghadapi semua tantangan serta tetap tangguh dalam pengawalan pembangunan. Karena, ke depannya kita punya ambisi luar biasa, bukan perak ataupun perunggu, melainkan Indonesia Emas 2045!

Salam Redaksi.

Salam Redaksi

SUSUNAN REDAKSI

Pelindung: Kepala BPKP – **Pembina:** Sekretaris Utama – **Penasihat:** Para Deputi Kepala BPKP – **Kontributor Ahli:** R. Ersi Soenarsih, Setya Nugraha, Iwan Agung Prasetyo – **Kontributor Tetap:** Edi Sunardi, Sindu Senjaya Aji – **Pemimpin Umum:** Riyanti Ridzki Dewi – **Wakil Pemimpin Umum:** Nurly Wulan Sari – **Pemimpin Redaksi:** Yulia Pramita Rahman – **Pemimpin Administrasi:** Ristiandi Wijanarko – **Redaktur Pelaksana:** Dita Ariningrum – **Sekretaris Redaksi:** R. Hanifah – **Reporter:** Amalia Septianti, Wiwin Savitri, Putri Septanti Ismalia, Ferina Indah Pamaswari, Ronny Rakhmat Irianto, Fuad Rizky, Rahma Yulyanti – **Keuangan:** Nurjana Ismet Tuah, Isnawati Ekarini – **Desain Grafis:** Idiya Zikra, Viana Anggraeni Zahrin, Bintang Andhika Marta, Diana Nur Pertiwi, Septian Agam Wahyudi – **Administrasi:** R. Hanifah – **Dokumentasi:** Edi Purwanto – **Sirkulasi:** Petrus Sonny Santoso Putra

CONTENTS

- 04 THE BRIEF**
Menuju Indonesia Maju yang Berdaulat
- 08 COVER STORY**
Teropong Perekonomian 2023: Dinamika dan Tantangan Menuju Ekonomi Berkelanjutan
- 13 INDONESIA THIS QUARTER**
- 16 INFOGRAPHIC**
- 18 GOVERNANCE VANTAGE POINT**
Perlindungan Sosial Adaptif, Solusi Jeratan *Middle Income Trap*?
- 24 INTERNAL AUDITOR'S UPDATE**
Audit Internal dan *Artificial Intelligence*, Mau ke Mana Kita?
- 29 PUBLIC POLICY**
Honesty is Best Policy: Ujian Kesungguhan Kebijakan Pengadaan Berkelanjutan
- 37 PREVIEW**
- 39 JFA TALK**





43

INSPIRING PERSON

Bang Onim, Duta Relawan Kemanusiaan
Indonesia di Palestina

47

BOOK REVIEW

Bergelut di Tengah Laut

49

MOVIE REVIEW

Cerita Mimpi dan Romansa Sang Gadis
Peracik Kretek

53

MINWAS'S STORY

54

THE BEAUTY OF INDONESIA

Tradisi Pemakaman Unik Sebuah Desa di
Pulau Dewata

-

KOLOM ILMIAH

02 Kajian Teoritis *Sustainable Finance*
dalam Mengimplemantasikan *Sustainable*
Development Goals

13 Peran Internal Auditor dalam Mengawal
Pengelolaan Risiko Reputasi BUMN

MENUJU INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT

Ristiandi Wijanarko,
Subkoordinator Komunikasi Publik pada
Biro Hukum dan Komunikasi



THE BRIEF

Di zaman modern ini, terdapat konflik yang cukup menyita perhatian dunia, yaitu invasi Rusia terhadap Ukraina yang dimulai pada Februari 2022, dan baru-baru ini adalah perang antara Israel dengan Hamas yang dimulai pada 7 Oktober 2023. Pada perang Israel-Hamas yang terjadi belakangan, terdapat lebih dari

1.300 jiwa meninggal di pihak Israel, sedangkan lebih dari 15.000 jiwa meninggal di pihak Palestina, termasuk lebih dari 6.000 darinya adalah anak-anak.

Kondisi ini membuat perang Israel-Hamas menjadi perang yang paling mematikan bagi anak-anak di era modern. Perang Israel-Hamas juga menjadi perang yang mematikan

“

Di mana ada **kekuatan yang besar**, di sana ada **tanggung jawab yang besar**.”

— Winston Churchill



Foto
Kominfo
BPKP

bagi warga sipil karena sebagian besar korban adalah penduduk sipil (utamanya warga Palestina di Gaza). Kondisi penduduk di Gaza pun sangat memprihatinkan karena pemutusan jaringan utilitas seperti air, bahan bakar, makanan, dan listrik oleh pemerintah Israel.

Perang ini telah memicu gelombang protes di seluruh dunia

yang menyerukan keberadaan gencatan senjata. Menindaklanjuti aspirasi tersebut, mayoritas negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Majelis Umum (*General Assembly*) dan Dewan Keamanan (*Security Council*) telah mengusulkan resolusi gencatan senjata atas dasar kemanusiaan, namun kedua resolusi ini diveto oleh Amerika

Serikat yang mendukung langkah agresif Israel.

Langkah mayoritas anggota PBB yang menyerukan gencatan senjata konsisten dengan tujuan utama pendirian PBB, yaitu untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, serta penghormatan hak asasi manusia. Tujuan ini juga terdapat dalam pembukaan UUD 1945, yaitu “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Sebuah tujuan yang menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan dan kedamaian.

Komitmen Indonesia terhadap perdamaian dan kemanusiaan ini dijawabntahkan melalui berbagai kebijakan pemerintah, baik bantuan kemanusiaan maupun langkah diplomasi untuk menghentikan konflik bersenjata tersebut. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam (11 November), Presiden Joko Widodo menyerukan pentingnya gencatan senjata. Selain itu, Indonesia juga terpilih menjadi salah satu negara anggota yang diberikan mandat untuk mengkampanyekan penghentian perang di Gaza. Dalam lawatannya ke Amerika Serikat (14 November), Presiden Jokowi pun menyampaikan resolusi dari KTT Luar Biasa OKI agar Amerika turut berpartisipasi untuk segera dilakukan gencatan senjata demi kemanusiaan. Sayangnya, Amerika tetap berada dalam posisi yang menolak resolusi tersebut.

Keputusan Washington, sebagai salah satu anggota tetap PBB, yang memveto gencatan senjata tentu sungguh disayangkan. Dengan pengaruhnya sebagai negara *super power* dunia, tentu Washington memiliki potensi yang sangat besar untuk segera mengakhiri konflik dan menangani darurat kemanusiaan. Langkah veto ini sangat kontras dengan posisi Amerika dalam Majelis Umum PBB lalu yang mengutuk invasi Rusia ke Ukraina, di mana saat itu sikap Amerika justru sejalan dengan mayoritas anggota majelis. Saat itu, justru Moskow yang memveto resolusi majelis. Sebagai negara adidaya, Amerika memiliki tanggung jawab yang besar untuk membantu mengakhiri krisis kemanusiaan di Gaza. Seperti kata Churchill,

“Where there is great power there is great responsibility.”

Melihat kepada kondisi tersebut, untuk dapat mewujudkan cita-cita bangsa dalam menjunjung tinggi kemanusiaan dan perdamaian dunia secara adil dan konsisten, maka Indonesia harus turut menjadi negara adikuasa. Dengan demikian, pengaruh Indonesia terhadap ekonomi dan politik di tingkat kawasan maupun global dapat dimaksimalkan untuk kebaikan rakyat semesta.

Mendukung hal tersebut, fokus pemerintah di tahun 2023 untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan produktivitas sudah berada dalam

arah yang sesuai. Dengan ekonomi yang kuat, maka Indonesia dapat berperan lebih di kancah dunia. Di sini, aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) memiliki peran strategis untuk memastikan Indonesia menjadi bagian dari negara maju dan masuk lima besar ekonomi terkuat dunia, sebagai sebuah visi dari Indonesia Emas 2045. Dengan kewenangannya, APIP harus dapat memastikan bahwa program-program pemerintah mencapai tujuannya secara efektif, dengan membelanjakan setiap rupiah yang diperoleh sebijaksana mungkin.

Melihat hampir setahun ke belakang, APIP sudah dapat

mulai mengevaluasi apa yang sudah diberikan kepada negara. Sudah sampai sejauh mana rekomendasi perbaikan diterima oleh para pemangku kepentingan dan ditindaklanjuti. Dari hasil evaluasi ini dapat diidentifikasi titik-titik kelemahan untuk menjadi bahan perbaikan di masa mendatang. Suatu proses perbaikan secara terus menerus untuk selalu meningkatkan manfaat kepada publik. Harapannya, APIP dapat berperan optimal dalam mendukung pemerintah memberikan kesejahteraan dan keadilan sosial seluas-luasnya kepada masyarakat, menuju Indonesia maju yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.



Foto
BPKP
Papua Barat



TEROPONG
PEREKONOMIAN 2023:

DINAMIKA DAN TANTANGAN

MENUJU EKONOMI BERKELANJUTAN



Sebagai tahun yang penuh tantangan dan perubahan, 2023 membawa sorotan khusus pada perekonomian Indonesia. Seperti yang digambarkan pada *cover* majalah Warta Pengawasan edisi ini, teropong perekonomian ini akan menyusuri dan merangkum berbagai momen krusial serta tren yang membentuk peta jalan ekonomi Indonesia untuk mencapai ekonomi yang berkelanjutan yang tidak mengabaikan kelestarian lingkungan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ekonomi berkelanjutan menjadi fokus utama di tahun 2023, dengan penekanan pada investasi hijau dan transformasi bisnis dalam mengatasi tantangan lingkungan dan ekonomi. Oleh karena itu, dalam mewujudkan tujuan besar perekonomian nasional tersebut, kita dapat memotret aspek-aspek yang mendukung tujuan perekonomian tersebut di tahun 2023.

Lingkaran Investasi Hijau

Seperti kita ketahui, investasi memiliki implikasi jangka panjang yang berdampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi suatu negara. Investasi tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung tetapi juga memberikan kontribusi pada penciptaan lapangan kerja, inovasi, dan peningkatan produktivitas. Dengan dampak besarnya terhadap perekonomian sampai dengan berujung pada kesejahteraan masyarakat, tentunya perlu menjaga investasi untuk terus menerus berlanjut. Investasi berkelanjutan diarahkan pada proses investasi yang mementingkan pada aspek-aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik, mencakup *Environment, Social, dan Governance* (ESG) untuk menjaga dua aspek yaitu keberlanjutan perekonomian serta kehidupan di bumi.

Investasi hijau menjadi salah satu pilar utama dalam ekonomi berkelanjutan di tahun 2023. Para investor, baik individu maupun lembaga keuangan, semakin fokus pada proyek yang ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, teknologi ramah lingkungan, dan bisnis yang berkomitmen pada praktik-praktik berkelanjutan untuk meraih keuntungan jangka panjang dan meredam dampak negatif perubahan iklim. Di tahun 2023, investasi hijau ditargetkan dapat terealisasi hingga 20 persen dari total keseluruhan nilai investasi di Indonesia.¹ Momentum G20 di Bali menjadi salah satu ajang dalam menarik kesempatan dalam berinvestasi hijau. Gerakan investasi hijau ini direncanakan diterapkan dengan pengembangan ekosistem energi listrik, energi baru terbarukan, kawasan industri hijau dan industri hemat energi yang ramah lingkungan.²

¹ <https://money.kompas.com/read/2023/10/25/173600326/bahlil-targetkan-realisis-investasi-hijau-capai-20-persen-tahun-ini>

² <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5190548/jokowi-genjot-investasi-ekonomi-hijau?page=2>

Pembangunan Industri Berkelanjutan

Sektor industri memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi suatu negara karena berkontribusi terhadap tujuan pembangunan ekonomi nasional. Kontribusi sektor industri khususnya dalam pembentukan PDB dan dalam meningkatkan nilai tambah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) industri pengolahan merupakan lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB (18,34% dari total PDB 2022).

Sektor industri memang memainkan peran penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat serta menunjang perekonomian negara. Namun, di balik kontribusi positifnya, sektor ini juga menjadi salah satu penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim global. Selain itu, kehadiran industri juga merupakan penyumbang pencemaran lingkungan berupa pencemaran udara, air, tanah oleh emisi gas rumah kaca serta gas polutan karbon dioksida (CO₂) yang saat ini juga menjadi isu penting di tataran global. Pengolahan limbah dari kegiatan industri yang tidak tepat menyebabkan pencemaran lingkungan. Bahkan, dalam

Laporan *World Wide Fund for Nature* (WWF) menunjukkan bahwa total dari 550 sungai yang ada di Indonesia, 82 persennya dalam kondisi rusak karena tercemar.³ Kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan apabila tidak segera diatasi.

Oleh karena itu, dalam menjaga lingkungan, sangatlah penting sektor industri menerapkan industri hijau yang berkelanjutan. Industri perlu mengintegrasikan sumber daya energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi, mengurangi pencemaran serta mengurangi emisi industri. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan ini, diperlukan komitmen bersama dari pemerintah, industri, dan masyarakat. Sehingga, pada akhirnya industri dapat memainkan peran penting dalam menciptakan dunia yang lebih bersih, hijau, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Di tahun 2023, langkah strategis dalam menerapkan industri hijau berkelanjutan yaitu dengan pengurangan emisi karbon dan *circular economy* sebagaimana kebijakan dunia seperti EU Green Deal serta implementasi kebijakan industri hijau. Dari sisi kebijakan, hingga saat ini telah terdapat 28 Standar Industri Hijau (SIH) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian. Dalam pelaksanaannya, sampai saat ini telah ada 37 perusahaan industri yang telah memperoleh bantuan fasilitasi sertifikasi industri hijau.⁴ Harapannya, industri hijau tidak hanya berada di tataran kebijakan ataupun standar, melainkan juga benar-benar diterapkan dalam perindustrian di Indonesia.

³ <https://www.greeners.co/berita/hari-air-sedunia-wwf-kondisi-sungai-di-indonesia-mengkhawatirkan/>

⁴ <https://kemenperin.go.id/artikel/22450/Kemenperin-Dorong-Pembangunan-Industri-Berkelanjutan->

Pemberdayaan UMKM dan Koperasi Masyarakat:

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki tujuan untuk memperbaiki sosial ekonomi masyarakat yang dalam pelaksanaannya berdasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi rakyat, seperti prinsip kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan (gotong royong), berkeadilan, dan berkelanjutan. Pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi hal penting dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Bukan

hanya itu, pemberdayaan koperasi dan UMKM juga diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dari segi sosial, lingkungan, dan ekonomi. Jadi, selain untuk pemberdayaan komunitas, UMKM dan koperasi dapat berkontribusi dalam praktik ekonomi berkelanjutan dengan penggunaan sumber daya lokal dengan praktik produksi tradisional yang berkelanjutan, sampai dengan ikut berpartisipasi dalam rantai pasok global dengan tetap mendukung prinsip berkelanjutan.

Secara lebih detail, transformasi model UMKM Hijau yang dikembangkan oleh Bank Indonesia (BI) mengkategorikan UMKM menjadi tiga level. Kategori *eco-adopter*, untuk UMKM yang mulai mengadopsi praktik ramah lingkungan, namun belum sepenuhnya ramah lingkungan.



⁵ https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2520523.aspx

⁶ <https://asean2023.id/id/news/indonesia-in-asean-scope-role-influence-benefits-and-future-efforts>

Kemudian, *eco-entrepreneur* untuk UMKM yang sudah mengadopsi praktik ramah lingkungan dimana keberlanjutan merupakan bagian dari inti model bisnis, dengan seluruh proses bisnis UMKM sudah ramah lingkungan serta dapat menangkap peluang “pasar hijau”. Terakhir, UMKM *eco-innovator* untuk UMKM yang sudah melakukan *eco-innovation* dalam meningkatkan produksi, proses produksi, pemasaran, organisasi, praktik bisnis, dan hubungan eksternal yang ditujukan mengurangi dampak lingkungan.⁵ Model transformasi ini, diharapkan dapat memacu UMKM untuk dapat terus menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan serta ramah lingkungan.

Peran Indonesia dalam perekonomian Global:

Sebagai salah satu negara dengan bonus demografi besar, Indonesia tentunya memiliki dampak ekonomi yang signifikan secara regional maupun global. Oleh karena itu, kehadiran Indonesia dalam perekonomian secara global menjadi sangat penting. Peran aktif Indonesia di kancah global dapat dilihat dari keikutsertaan Indonesia dalam berbagai organisasi internasional seperti PBB, G20, dan ASEAN. Di Asean, Indonesia turut aktif dalam program *ASEAN Framework on Disaster Management*, *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*, dan *ASEAN Centre for*

Biodiversity.⁶ Serta turut serta dalam berbagai forum dan konferensi yang menyuarakan pentingnya membangun perekonomian yang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Partisipasi ini memberikan peluang untuk dapat ikut serta dalam penyusunan kebijakan dan kerjasama ekonomi global. Dengan komitmen serta kesepakatan-kesepakatan dalam menerapkan ekonomi secara berkelanjutan, diharapkan juga mampu mendorong implementasi kebijakan tersebut.

Namun, penerapan ekonomi berkelanjutan tentunya bukan tanpa tantangan. Aktor-aktor yang harusnya mulai bertransformasi masih resisten terhadap perubahan, sementara infrastruktur berkelanjutan memerlukan investasi besar dan waktu untuk berkembang sepenuhnya.⁷ Dalam upaya mencapai ekonomi berkelanjutan, kolaborasi global dan komitmen jangka panjang dari semua pihak akan menjadi kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Di penghujung tahun 2023 ini, teropong perekonomian mencoba memberikan gambaran menyeluruh tentang perekonomian Indonesia pada tahun 2023, menyoroti dinamika, perkembangan, dan tantangan yang dihadapi. Dengan melihat melalui teropong ini, kita mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang arah dan dinamika perekonomian Indonesia yang sedang berkembang. Jadi, sudahkah ekonomi berkelanjutan diterapkan dengan bijak? Bukankah generasi mendatang semestinya mendapatkan lingkungan yang layak?

(Yulia Pramita Rahman)

⁷ <http://circle-archive.com/index.php/carc/article/view/41>

BPKP RAIH PENGHARGAAN TOP 45 INOVASI PELAYANAN PUBLIK



Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) raih predikat Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023 klaster Kementerian Lembaga yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas kepada Deputi Kepala BPKP Bidang

Pengawasan Keuangan Daerah Raden Suhartono.

Penganugerahan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2023 melalui inovasi “Membangun Akuntabilitas Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa)” yang dikembangkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Aplikasi Siskeudes tidak hanya mengelola dana desa saja, tetapi seluruh sumber dana penerimaan desa yaitu PADes, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Provinsi, Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dan lain-lain pendapatan yang sah (7 Sumber dana desa).

BPKP BANGUN *SMART BUILDING* PUSDIKLATWAS

Pusdiklatwas sebagai salah satu unit kerja BPKP yang diamanahi tugas untuk melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan, dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan pengawasan bagi pegawai BPKP maupun APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) kementerian/lembaga/pemda, tentunya memiliki peran penting dan strategis untuk mendukung pencapaian misi BPKP membangun sumber daya pengawasan yang berkualitas. Sebagai salah satu langkah mencapai visi “Menjadi Lembaga Diklat Pengawasan Intern Pemerintah Berkelas Dunia”, Pusdiklatwas terus melakukan



peningkatan kualitas salah satunya dengan dilakukannya pembangunan smart building di empat lokasi sebagai penunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi APIP.

LFD BPKP TERAKREDITASI SNI ISO/IEC

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berhasil mendapatkan Sertifikat Akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 pada Laboratorium Forensik Digital (LFD BPKP). Sertifikasi Akreditasi SNI ini, diberikan secara langsung oleh Ketua Komite Akreditasi Nasional kepada Kepala BPKP. Laboratorium Forensik Digital hadir dalam upaya mengungkap *fraud* karena auditor harus



selangkah lebih maju dari pelakunya. Untuk memberikan penjaminan atas hasil pengujian, sejak Januari 2023 Laboratorium Forensik Digital BPKP telah melalui serangkaian persiapan dan tahapan untuk memperoleh akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017. Upaya ini merupakan perwujudan komitmen BPKP untuk menghempaskan belenggu korupsi dari negeri kita, Indonesia.

PUSDIKLATWAS BPKP GELAR PELATIHAN DAN SERTIFIKASI

Dalam rangka peningkatan efektivitas penerapan kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) kementerian/ lembaga serta pengembangan kemampuan manajemen risiko anti-fraud Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP menggelar program pelatihan dan sertifikasi *Certified Government Risk Executive* (CGRE) Batch 1 dan *Fraud Risk Management Professional* (FRMP) Batch 1.

Tujuan pelatihan dan sertifikasi CGRE adalah agar peserta mampu merancang kebijakan MRPN yang efektif di lingkungan entitas MRPN. Sedangkan tujuan pelatihan dan sertifikasi FRMP adalah agar peserta



mampu menyusun kebijakan anti-*fraud* dan melaksanakan proses manajemen risiko. Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan apresiasi pada segenap mitra dari kementerian dan lembaga yang selama ini berkolaborasi mengawal akuntabilitas keuangan negara dan mengelola risiko pembangunan nasional.

BPKP SIAP MENUJU ORGANISASI BERBASIS DATA

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggelar Pelatihan Transformasi Digital dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data. Pelatihan ini untuk mencapai pengawasan yang berkualitas dan pengetahuan di bidang



transformasi digital. BPKP sebagai lembaga yang berperan strategis dalam pengawasan dan pembangunan negara, telah berada di garis depan untuk menjaga integritas dan efisiensi pengelolaan keuangan dan pembangunan.

Sekretaris Utama BPKP, Ernadhi Sudarmanto menyampaikan bahwa di tahun ini dan beberapa periode sebelumnya, BPKP telah melakukan audit dengan memanfaatkan IT, seperti pada pengawasan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), pengentasan kemiskinan, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam pengawasan tersebut ditemukan bahwa pengawasan dilakukan dengan menggunakan data yang besar dan hubungan data yang kompleks. Sehingga menurutnya disini transformasi digital memegang peranan penting dalam tugas pengawasan yang dilakukan BPKP.



BPKP BUKA PELATIHAN SERTIFIKASI CREL

Sejalan dengan salah satu kebijakan MRPN, yaitu peningkatan kompetensi, sertifikasi *Certified Risk Executive Leader* (CREL) ini merupakan salah satu upaya BPKP untuk mengembangkan kapabilitas manajemen risiko di korporasi, khususnya di level eksekutif.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh berharap, dengan adanya manajemen risiko yang terintegrasi ini, risiko-risiko yang mengancam ketercapaian tujuan pembangunan dapat terpetakan.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo, mengapresiasi BPKP karena telah membangun program sertifikasi yang sejalan dengan program yang ada di Kementerian BUMN. Dengan penerapan manajemen risiko yang baik di korporasi, tentunya akan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional.

TREN, TARGET, DAN CAPAIAN EKONOMI 2023

Alokasi Dan Asumsi APBN 2023 Vs RAPBN 2024



Alokasi Anggaran

	APBN 2023	RAPBN 2023
Pendidikan	Rp612,2T	Rp660,8T
Kesehatan	Rp178,7T	Rp186,4T
Perlindungan Sosial	Rp476T	Rp493,5T
Infrastruktur	Rp392T	Rp422,7T
Ketahanan Pangan	Rp104,2T	Rp108,8T



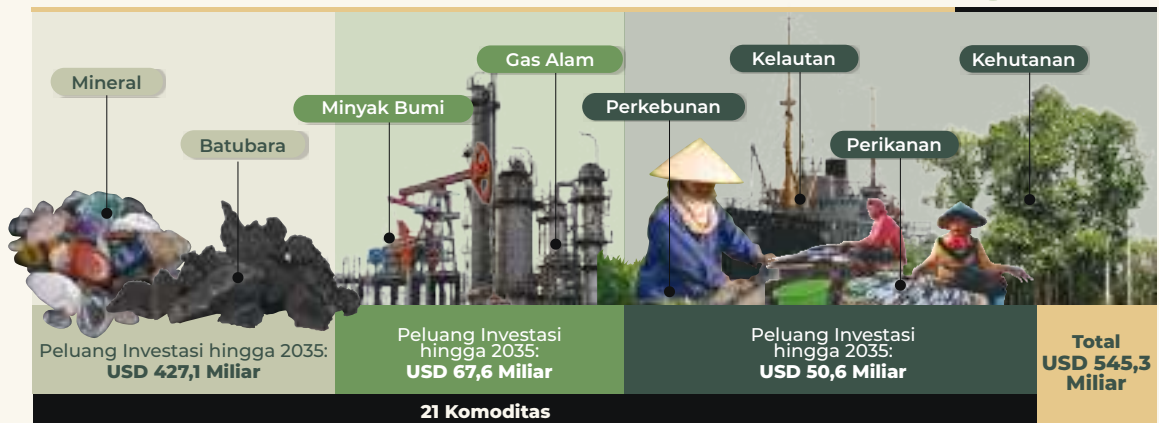
Asumsi Dasar Makro

	APBN 2023	RAPBN 2023
Pertumbuhan Ekonomi	Rp5,3T	5,2%
Inflasi	Rp3,6T	3,6%
Nilai Tukar Rupiah	Rp14.800/US\$	Rp15.000/US\$
Tingkat Bunga SUN 10 Tahun	7,9%	6,7%
Harga Minyak Mentah Indonesia	US\$90/barel	US\$80/barel
Lifting Minyak	660 ribu barel/hari	625 ribu barel/hari
Lifting Gas	1,1 Juta barel setara minyak/hari	1,03 Juta barel setara minyak/hari

Sumber: Nota Keuangan RAPBN 2024 & UU No.20 Tahun 2022 tentang APBN Tahun Anggaran 2023

Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis

8 Sektor Prioritas



Sumber: Kementerian Investasi

Investasi Indonesia Triwulan III-2023 Naik

Realisasi Investasi 2023

Data BKPM, 20 Oktober 2023

Investasi pada triwulan III naik **Rp24,6 triliun** dibanding triwulan sebelumnya atau tumbuh 7% (q-to-q)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III-2023

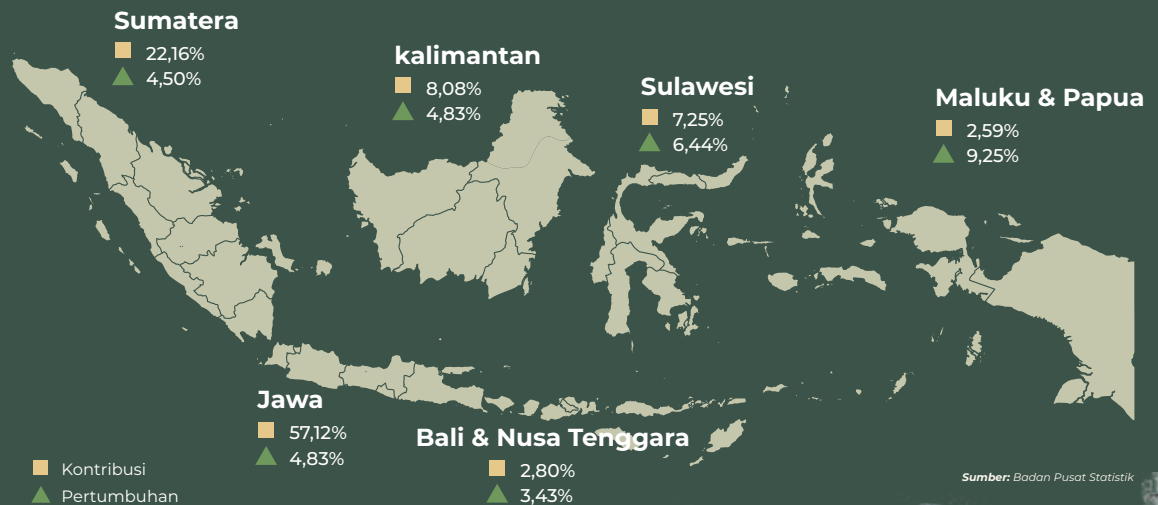
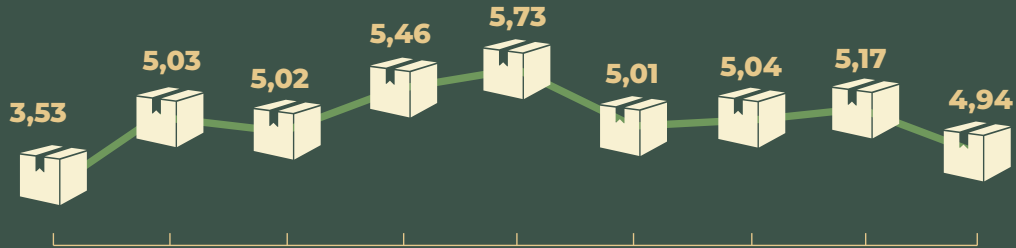
Q-TO-Q
1,60%

Y-ON-Y
4,94%

C-TO-C
5,05%

PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) HARGA BERLAKU
Rp5.296,0 Triliun

Pertumbuhan produk Domestik Bruto (PDB) 2021-2023 (Y-ON-Y)
(persen), Triwulan III-2021-Triwulan II-2023



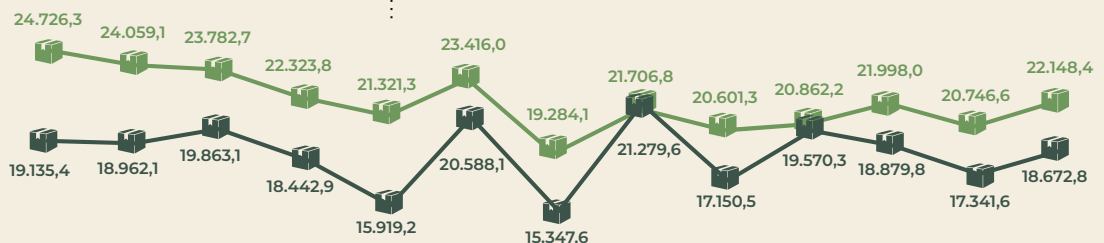
Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia

Oktober 2023

Ekspor

-10,43%

Di banding Oktober 2022



Impor

-2,42%

Di banding Oktober 2022

Ilustrasi
Diana Nur
Pertiwi

Sumber: Badan Pusat Statistik



PERLINDUNGAN SOSIAL ADAPTIF

SOLUSI JERATAN *MIDDLE INCOME TRAP*

Carlo Rivelacio,

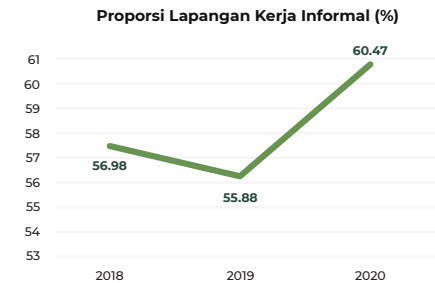
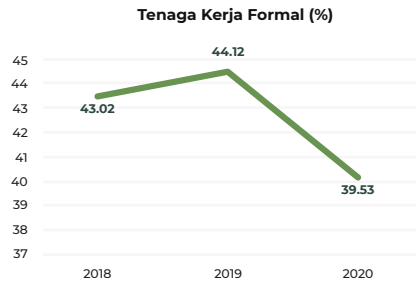
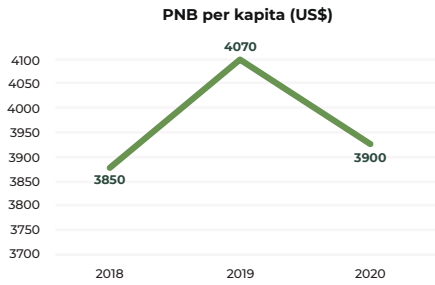
Auditor pada Deputi BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK

Guncangan dan pengaruhnya terhadap pendapatan dan angka pengangguran

Pandemi Covid-19 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang negatif di berbagai negara, termasuk Indonesia. Akibat guncangan pandemi, PNB per kapita Indonesia mengalami penurunan dari US\$4.070 di tahun 2019 menjadi US\$3.900 di

tahun 2020. Penurunan tersebut membuat Indonesia jatuh kembali ke dalam kategori *Lower Middle-Income Country* atau negara berpendapatan menengah bawah, dengan angka pengangguran yang semakin parah.

Komitmen pemerintah dalam menanggulangi dampak pandemi diwujudkan dengan implementasi



Sumber:
Data World
Bank dan
Tabel
Dinamis
Badan Pusat
Statistik
(diolah)

kebijakan kesehatan, penguatan perlindungan sosial, serta dukungan bagi dunia usaha. Hasilnya, setelah lebih dari tiga tahun sejak merebaknya COVID-19, menurut rilis World Bank pada Juni 2023, Indonesia berhasil naik kembali ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas (*Upper Middle-Income Country*), dengan capaian PNB per kapita sebesar US\$4.580 pada 2022.

Belajar dari pandemi, perlu langkah adaptif dalam membangun resiliensi

Guncangan berupa COVID-19 telah memberikan pelajaran penting bagi pemerintahan di seluruh dunia. Bagi negara berkembang termasuk

Indonesia, pandemi semakin menjerumuskan kondisi perekonomian pada level yang lebih rendah sehingga menyulitkan upaya untuk bebas dari jebakan negara berpendapatan menengah (*middle-income trap*).

Diperlukan sistem perlindungan sosial yang adaptif dan mampu menjangkau lapisan masyarakat yang terdampak secara segera. Hal tersebut patut untuk diperhatikan sebagai respon cepat dalam meminimalisasi dampak bagi perekonomian negara. Terlebih lagi, Indonesia harus mampu menghindari *middle-income trap*, sebelum bonus demografi berakhir pada tahun 2040¹.

¹ Kiki Verico, *Global Pandemic 2020: Indonesia's Output Gap and Middle-Income Trap Scenario*, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021, halaman 4..

Sistem perlindungan sosial harus adaptif dan mampu menanggulangi guncangan sehingga dapat membangun ketahanan masyarakat, baik sebelum, selama, dan setelah guncangan terjadi. Sebagai negara dengan risiko bencana tertinggi ketiga di dunia², Indonesia telah memiliki sistem perlindungan sosial. Namun demikian, sistem tersebut masih belum sepenuhnya mampu merespon kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok yang rentan terhadap guncangan (bencana dan perubahan iklim). Lalu bagaimana langkah yang harus ditempuh dalam menciptakan sistem Perlindungan Sosial Adaptif dalam membangun resiliensi sekaligus menjaga pertumbuhan perekonomian terhadap bencana?

Mengukuhkan perlindungan sosial adaptif sebagai proyek prioritas strategis

Belajar dari keterjadian pandemi, sistem perlindungan sosial perlu direformasi. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial pun telah dicanangkan sebagai salah satu *major project* yang mendapat penekanan (*highlight*) dalam RKP Tahun 2023. Salah satu agenda penting dalam proyek prioritas strategis tersebut adalah pengembangan perlindungan sosial yang adaptif terhadap bencana alam maupun non-alam.

Perlindungan Sosial Adaptif (disingkat PSA) merupakan upaya untuk membangun ketahanan/ resiliensi kelompok masyarakat miskin dan rentan melalui peningkatan kapasitas dalam

Prabencana	Tanggap Darurat	Pasca Bencana
- Keterbatasan dana simpanan dan aset dalam menanggulangi dampak guncangan; - Keterbatasan akses jaring pengaman sosial dan asuransi; - dan Keterbatasan akses informasi risiko.	Kecenderungan menerapkan strategi penanggulangan yang negatif: - Mengurangi konsumsi kebutuhan primer; - Menghentikan anak bersekolah; - Menjual aset-aset produktif; - Mengambil pinjaman bunga tinggi.	- Kekurangan sumber daya untuk bangkit lebih baik dan beradaptasi; - Kerentanan terhadap guncangan di masa depan.

Hal-hal yang Menyebabkan Masyarakat Miskin dan Rentan Berpotensi untuk Semakin Jatuh dalam Kemiskinan

Sumber: Diolah dari kajian *World Bank* berjudul *Adaptive Social Protection: Building Resilience to Shocks* (2020)

² Franziska Atwii, Welthungerhilfe, Dr. Kristin Bergtora Sandvik, PRIO, University of Oslo, Lotte Kirch, Bündnis Entwicklung Hilft, Dr. Beáta Paragi, Corvinus University of Budapest, Dr. Katrin Radtke, IFHV, Sören Schneider, IFHV, Daniel Weller, IFHV, WorldRiskReport 2022: Focus Digitalization, Ruhr University Bochum – Institute for International Law of Peace and Armed Conflict (IFHV), 2022, halaman 6.

mempersiapkan, menanggulangi, dan beradaptasi dalam berbagai jenis guncangan (bencana alam dan non alam serta perubahan iklim). PSA memastikan kelompok masyarakat miskin dan rentan tidak semakin jatuh ke dalam kemiskinan yang disebabkan oleh keterjadian guncangan.

Dari aspek ekonomi, reformasi perlindungan sosial diharapkan dapat membantu mengungkit keberhasilan penurunan angka tingkat kemiskinan menjadi 7,5-8,5% di tahun 2023 dan 6-7% di tahun 2024.

Memastikan ketersediaan dan kecukupan pilar-pilar PSA di Indonesia

PSA dapat membangun resiliensi dan menjaga perekonomian negara dengan memastikan pemerintah telah mengoptimalkan intervensi pada tiga fase penting.

Pertama, pada masa pra bencana, PSA akan menginformasikan dan menetapkan langkah penanggulangan serta adaptasi kepada masyarakat miskin dan rentan. Hal ini dilakukan

dengan cara (1) meningkatkan akses terhadap jaring pengaman sosial, (2) menyediakan upaya preventif sebelum guncangan, termasuk informasi risiko dan (3) meningkatkan dana simpanan dan inklusi keuangan.

Kedua, pada masa tanggap darurat, PSA akan meminimalisasi dampak langsung dari keterjadian guncangan. Upaya tersebut dilakukan melalui: (1) pengembangan program yang responsif terhadap guncangan dan (2) melakukan diversifikasi terhadap mata pencaharian dan sumber pendapatan.

Ketiga, pada masa pasca bencana, PSA akan mengurangi kerentanan terhadap guncangan dalam jangka panjang dengan cara (1) menyediakan program padat karya untuk mengatasi kerentanan dan (2) membangun regenerasi SDM yang tangguh.

Optimalisasi intervensi tersebut perlu didukung oleh tata kelola yang memadai. Tata kelola PSA terdiri atas empat komponen vital, yakni: (1) Program, (2) Data dan Informasi, (3) Pendanaan, dan (4) Kelembagaan dan Kemitraan.

Pilar program memastikan guncangan teredam

Program perlindungan sosial adaptif merupakan kombinasi dari berbagai program dengan



Kombinasi Program Perlindungan Sosial Adaptif

Sumber: Kajian *Institute of Development Studies (University of Sussex)* berjudul *Adaptive Social Protection: Guidance Notes for Practitioners* (2020)

cakupan yang luas untuk membangun resiliensi. Berbeda dari perlindungan sosial konvensional, program/kegiatan perlindungan sosial adaptif juga perlu memperhatikan faktor sosial dan lingkungan (terkait bencana dan perubahan iklim)³. Ketiga faktor tersebut harus terpenuhi untuk menjadi kombinasi program yang saling terkait satu sama lain.

Pilar data dan informasi memastikan efektivitas intervensi

Kebermanfaatan program PSA sangat dipengaruhi oleh data dan informasi yang berkualitas. Secara umum, data dan informasi PSA harus dapat mengakomodasi: (1) jenis guncangan yang mengancam suatu negara, (2) tingkat kemungkinan keterjadian guncangan, (3) wilayah yang berpotensi mengalami guncangan, dan (4) kelompok manusia dan infrastruktur yang rentan terhadap guncangan.

Pengelolaan data dan informasi PSA yang berkualitas akan melibatkan hubungan lintas lembaga terkait yang merupakan komponen vital lainnya dalam konsep PSA. Untuk itu, inventarisasi data dan informasi PSA perlu dilakukan dengan mengoptimalkan peran, tugas, dan fungsi lembaga-lembaga yang terkait dengan pelaksanaan program perlindungan sosial,

pengurangan risiko bencana, dan adaptasi perubahan iklim.

Pilar pendanaan memastikan keberlangsungan penganggaran

Keberadaan pendanaan dalam manajemen risiko bencana merupakan bentuk adaptasi pemerintahan yang betul-betul menyadari budaya risiko. Bencana harus dilihat sebagai suatu hal yang dapat dikelola, bukan suatu hal yang tidak dapat diprediksi sama sekali. Hal tersebut perlu dilakukan untuk dapat meminimalisasi dampak.

Budaya sadar risiko akan mengubah pendekatan alokasi penganggaran/pendanaan dari sifat reaktif ke proaktif. Pendekatan proaktif tersebut akan mendorong pemerintah untuk mendanai sistem yang diperlukan untuk merespon kemungkinan keterjadian guncangan (pra bencana). Di samping itu, pendekatan proaktif memungkinkan terjaminnya pencairan dana pada saat guncangan terjadi (tanggap darurat). Dengan demikian, hal tersebut memungkinkan pemulihan dapat diwujudkan secara lebih cepat.

Pilar kelembagaan dan kemitraan memastikan tata kelola yang paripurna

PSA melibatkan berbagai pihak yang terlibat, baik lembaga-

³ Katharine Vincent dan Tracy Cull, *Adaptive Social Protection: Guidance Notes for Practitioners*, Institute of Development Studies, University of Sussex, 2012, halaman 7.

lembaga pemerintahan, swasta, dan masyarakat. Kelembagaan terkait dengan hubungan lintas sektoral di antara unit-unit kerja pemerintahan yang memegang tugas dan fungsi terkait perlindungan sosial, adaptasi perubahan iklim, dan pengurangan risiko bencana. Di samping itu, kemitraan terkait dengan hubungan antara pemerintahan dengan pihak swasta dan masyarakat.

Apa yang harus segera dibenahi?

Upaya pembangunan sistem perlindungan sosial yang adaptif harus ditempuh melalui pembenahan pada keempat pilarnya. Secara konseptual, dibutuhkan formulasi berupa integrasi bauran program, manajemen data dan informasi

sesuai dengan prinsip Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mendukung interoperabilitas, manajemen risiko keuangan, serta optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan.

PSA sebagai bagian dari Reformasi Sistem Perlindungan Sosial telah digaungkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Keberhasilan penetapan PSA ditargetkan dengan menetapkan adanya adopsi sistem PSA pada 30% instansi pusat dan daerah. Dengan menetapkan sistem PSA, cakupan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia dapat ditingkatkan. Hal tersebut selanjutnya dapat mengungkit penurunan angka kemiskinan sekaligus mewujudkan taraf perekonomian masyarakat Indonesia yang lebih baik.



AUDIT INTERNAL DAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE



Mau ke Mana Kita?

Perkembangan Kecerdasan Buatan

Encyclopedia Britannica menjelaskan pengembangan *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan diawali oleh Alan Turing pada tahun 1935, saat Turing merumuskan konsep yang kelak dikenal sebagai *the Turing machine*. Menurut kesaksian koleganya, hal ini terus berlanjut saat Perang Dunia II. Pada tahun

1947, Turing membicarakan kemungkinan komputer untuk belajar dari pengalaman dan mengubah instruksinya sendiri jika mekanismenya tersedia. Ia juga merilis laporan berjudul “Intelligent Machinery” yang memperkenalkan banyak konsep utama mengenai kecerdasan buatan pada tahun berikutnya.

Sejak saat itu, pengembangan kecerdasan buatan terus

berlanjut dengan cepat. Suka atau tidak, perkembangan kecerdasan buatan telah menimbulkan pro dan kontra dalam berbagai pihak. Salah satu kekhawatiran adalah penerapan kecerdasan buatan akan menghilangkan lapangan pekerjaan bagi manusia. Akan tetapi, sebenarnya, sebagaimana revolusi industri 1.0 mengurangi ketergantungan pada pekerjaan manual, penerapan kecerdasan buatan juga akan mengurangi pekerjaan-pekerjaan yang dapat diotomatisasi dan mempermudah tugas manusia.

Hal ini jugalah yang dikemukakan oleh Kahyaoglu dan Aksoy (2021). Mereka berpendapat secara umum proses otomatisasi, digitalisasi dan penerapan kecerdasan buatan adalah proses berkelanjutan yang akan mengeliminasi beberapa pekerjaan. Akan tetapi, situasi ini hanya akan menjadi masalah bagi orang-orang yang tidak bisa beradaptasi pada lingkungan kerja dan inovasi teknologi. Bahkan, hal sebaliknya akan berlaku jika para pekerja mampu beradaptasi, terutama dalam hal peningkatan *soft skills* dan *digital skills* (Wodechi, 2019 dalam Kahyaoglu dan Aksoy, 2021). Dengan meningkatkan *soft skill* dan *digital skill*, tentunya kesempatan akan terbuka untuk bekerja pada pekerjaan-pekerjaan baru dalam lingkungan kerja digital.

Dalam membicarakan dampak kecerdasan buatan terhadap dunia kerja, Westland (2020) dalam Kahyaoglu dan Aksoy (2021), membedakan tugas-tugas menjadi tugas rutin dan non-rutin. Tugas-tugas non-rutin ini adalah tugas-tugas yang lebih membutuhkan ketahanan, produktivitas, kreativitas, pemecahan masalah, dan komunikasi yang baik. Karakteristik ini yang dinilai bisa mempengaruhi *sustainability* pekerjaan. Maksudnya, pekerjaan yang *sustain* ini akan lebih mampu bertahan tidak akan begitu saja tergantikan oleh kecerdasan buatan.

Dalam menilai tugas-tugas yang kemungkinan besar dapat tergantikan oleh kecerdasan buatan, kita bisa melihat pendapat Manyika, et al. (2017) dan Bughin, et al. (2018) dalam Kahyaoglu dan Aksoy (2021). Dalam penelitiannya, mereka membagi tugas-tugas (*tasks*) ke dalam tujuh kelompok besar dengan mengukur potensi otomatisasi terhadap tugas-tugas tersebut, yaitu:



Pekerjaan fisik yang mudah diprediksi, 81% dapat diotomatisasi.



Pemrosesan data, 69% dapat diotomatisasi.



Pengumpulan data, 64% dapat diotomatisasi.



Pekerjaan fisik yang sulit diprediksi, 26% dapat diotomatisasi.



Interaksi personal antarmuka, 20% dapat diotomatisasi.



Keahlian (*expertise*) termasuk pengambilan keputusan, perencanaan dan proses kreatif, 18% dapat diotomatisasi.



Manajemen, 7% dapat diotomatisasi.

Semakin besar persentase dapat diotomatisasi, maka semakin

besar kemungkinan tugas tersebut akan dapat digantikan oleh teknologi dan kecerdasan buatan. Dari penilaian di atas, terlihat bahwa tugas-tugas yang berpotensi besar dapat diotomatisasi adalah tugas-tugas yang bersifat rutin, serta kurang membutuhkan kreativitas, kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaannya.

Bagaimana *Artificial Intelligence* Membantu Profesi Auditor Internal

Jika melihat karakteristik tugas-tugas yang dapat tergantikan oleh kecerdasan buatan, dapat kita simpulkan bahwa pengembangan kecerdasan buatan tidak akan



otomatis bisa menggantikan profesi auditor internal yang mengutamakan keahlian (*expertise*) dan kemampuan manajemen (pengelolaan). Hasil pengamatan berbagai ahli, profesi auditor internal malah diuntungkan dengan kemunculan kecerdasan buatan jika auditor

internal bisa memanfaatkannya dengan benar.

Salah satu penelitian mengenai ini dilakukan oleh Zhou (2021) untuk menjelaskan solusi yang ditawarkan oleh teknologi kecerdasan buatan terhadap proses audit, yaitu:

Perbandingan	Dilema pada Audit Tradisional	Solusi dari Audit Ai
Hukum bisnis	Terbatas pada menemukan masalah	Mengatasi masalah dengan cepat dan akurat
Proporsi sampel	Membutuhkan informasi audit berkualitas tinggi	Mengurangi beban kerja auditor
Kualitas audit	Efisiensi rendah dan kualitas audit rendah	Meningkatkan efisiensi audit dan kualitas audit
Pembagian sumber daya	Sumber daya tidak dapat terbagi	Meningkatkan sistem pengendalian internal dan mengurangi risiko
Efisiensi audit	Perubahan menuju efisiensi dan partisipasi penuh dalam audit	Pengelolaan yang berkelanjutan dan efektif secara keseluruhan

Sumber:
Research on The Problems of Enterprise Internal Audit Under the Background of Artificial Intelligence, Zhou (2021)

Oleh karena itu, pemanfaatan kecerdasan buatan dalam berbagai hal di atas akan dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi pekerjaan audit internal. Perkembangan kecerdasan buatan juga memunculkan berbagai kemudahan bagi profesi audit internal. Zhou (2021) menjelaskan bahwa kemudahan berbagai data dalam era sekarang membantu auditor dalam pengumpulan informasi internal dan eksternal dari objek audit melalui berbagai saluran. Selain itu, pemanfaatan kecerdasan buatan juga dapat membantu auditor internal memahami

dengan cepat petunjuk dan bukti audit yang berharga, mengurangi asimetri informasi, serta mengurangi risiko audit internal. Auditor internal juga dapat menggunakan algoritma kecerdasan buatan, seperti *random forest*, *neural network*, dan analisis regresi untuk melakukan *data mining*, mengungkap risiko-risiko yang tersembunyi, dan membuat pekerjaan audit lebih terarah (Zhou, 2021). Zhou (2021) juga berpendapat bahwa audit internal dapat memanfaatkan *machine learning* dan *knowledge mapping technology* untuk menciptakan pengelolaan

pengetahuan dari pengalaman audit dan aturan-aturan risiko, membangun sistem dasar pengetahuan audit, membangun model kontrol risiko yang cerdas dan merespons secara *real time*, menggantikan pemrosesan dan analisis manual oleh auditor serta membantu mengatasi masalah mengenai pengumpulan talenta dan pengetahuan audit.

Ini Semua Soal *Mindset*

Mikalef et al. (2021) dalam Muslihatun et al. (2021) mengungkapkan bahwa untuk urusan pemanfaatan kecerdasan buatan, sektor publik masih tertinggal dari sektor privat. Beberapa negara telah mulai bergerak memanfaatkan kecerdasan buatan dalam pelayanan publik. Negara-negara di Eropa misalnya, telah merilis konsep aturan pemanfaatan kecerdasan buatan pada sektor publik (Council of Europe, 2021 dalam Muslihatun et al., 2021). Salah satu hal yang dijelaskan dalam aturan tersebut adalah penggunaan kecerdasan buatan di sektor publik bertujuan meningkatkan organisasi publik agar lebih efisien dengan menambah pekerjaan pekerja pemerintah sekaligus meningkatkan kualitas layanan yang ditawarkan. Sebagai auditor internal pemerintah Indonesia, tentu saja kita juga tidak mau ketinggalan. Perkembangan kecerdasan buatan, yang sempat disangka

akan mengurangi peran auditor internal di masa depan, ternyata juga memunculkan peluang pemanfaatan. Oleh karena itu, tidak salah jika kitalah yang harus beradaptasi sebagai manusia. Ilmu dan teknologi akan terus berkembang. Sudah sewajarnya manusia juga harus berkembang dan memanfaatkan peluang tersebut. Terpaku pada cara-cara lama dan ilmu-ilmu lama hanya akan berujung pada ketertinggalan. Peluang yang muncul dari pemanfaatan kecerdasan buatan ini bisa kita mulai raih dan manfaatkan demi kemajuan. Kalau hanya berpuas diri dengan mengerjakan pekerjaan rutin, sudah pasti kita akan tertinggal. Jadi, akan ke mana kita? Memanfaatkan AI atau digantikan oleh AI?

(Gilang Rahmat Hastanto)

Referensi

- Encyclopedia Britannica. *Artificial Intelligence, Alan Turing and The Beginning of AI*. <https://www.britannica.com/technology/artificial-intelligence/Alan-Turing-and-the-beginning-of-AI>. Diakses pada 15 November 2023.
- Kahyaoglu, S. B. & Aksoy, T. (2021). *Artificial Intelligence in Internal Audit and Risk Assessment*.
- Muslihatun, F. A. N., Hantono, B. S., & Fauziati, S. (2021). *Using Artificial Intelligence Technology for Decision Support System in Audit Risk Assessment: A Review Paper*.
- Zhou, G. (2021). *Research on The Problems of Enterprise Internal Audit Under the Background of Artificial Intelligence*.



Honesty is Best Policy:

UJIAN KESUNGGUHAN KEBIJAKAN PENGADAAN BERKELANJUTAN

Mustofa Kamal,
Widyaiswara Madya BPKP

George Washington, Benjamin Franklin, dan beberapa tokoh lain pernah menggaungkan; "*honesty is best policy*" (HiBPol). Cambridge dictionary mengungkap HiBPol berarti "*said to advise someone that it is better to tell the truth than to lie*". *Honesty* semarga dengan *openness* (keterbukaan), *sincerity* (ketulusan) dan *anti-corruption*. Jika menengok tren korupsi di Indonesia, tanpa memberi *judgment* pada siapa pun dan apa pun, HiBPol relevan untuk diejawantahkan secara sungguh-sungguh dalam kebijakan publik di Indonesia.

Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik adalah tentang apa yang pemerintah lakukan, alasan kenapa melakukan, dan apa perbedaan *before versus after* hasil kebijakan. Apapun yang dipilih pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Sedangkan William N. Dunn mengungkap bahwa kebijakan publik adalah rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain (BPKP, 2014), termasuk bidang pengadaan pemerintah.

Ada 9 (Sembilan) kebijakan pengadaan untuk mencapai 8 (delapan) tujuan pengadaan



pemerintah (Perpres 16/2018 jo 12/2021). **Kebijakan Pengadaan Pemerintah** (pasal 5 Perpres 16/2018) tersebut berupa; 1) meningkatkan kualitas perencanaan PBJ; 2) melaksanakan PBJ yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif; 3) memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia PBJ; 4) mengembangkan *E-marketplace* PBJ; 5) menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik; 6) mendorong PBJ dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI); 7) memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; 8) mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; **dan 9) melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.** Sedangkan,



Tujuan Pengadaan Pemerintah

(pasal 4 Perpres 12/2021) terdiri dari; 1) menghasilkan BJ yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia; 2) meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; 3) meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi; 4) meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional; 5) mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan BJ hasil penelitian; 6) meningkatkan keikutsertaan industri kreatif; 7) mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; **dan** 8) meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan. Antar kebijakan dan antar tujuan tersebut dihubungkan dengan frasa “dan” yang berarti 9 kebijakan harus dilaksanakan semua untuk mencapai 8 tujuan PBJ secara integral.

Jika ditinjau dari pendapat Thomas R. Dye, maka pemerintah Indonesia telah mengambil sikap berupa pilihan kebijakan **“menjalankan”** 9 kebijakan pengadaan tersebut, bukan “tidak menjalankan”. Kemudian, mandat kebijakan dan tujuan PBJ tersebut menunjukkan bahwa madzhab PBJ era sekarang “bukan hanya mikro” terkait output PBJ, tapi sudah “makro” berupa capaian kebijakan dan tujuan PBJ di berbagai aspek dan berbagai pemangku kepentingan secara integral.

Bahkan, politik hukum pengadaan mengungkapkan bahwa arah

kebijakan PBJ adalah bukan hanya demi ketercapaian output dan *outcome* instansi pemerintah, tapi juga harus ada peningkatan ekonomi baik para pelaku usaha maupun masyarakat melalui pemerataan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Sektor pembangunan hukum PBJ mengarah pada 3 (tiga) sektor secara *hybrid*, yaitu; sektor Ekonomi, Keuangan, Industri, Perdagangan, dan Infrastruktur (Ekuindagtur), sektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan sektor Sosial Budaya. Kebijakan pengadaan berkelanjutan (aspek sosial, dan lingkungan) menjadi bukti dua sektor terakhir dalam Pembangunan hukum PBJ (Kamal dan Bahar, 2019).

Namun, profil pengadaan tahun 2022 belum mengungkap penjelasan tentang capaian implementasi kebijakan pengadaan berkelanjutan (LKPP, 2023). Bahkan, data perencanaan di Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) masih ada yang belum mengungkap aspek PBJ berkelanjutan. Sebagai contoh; data SIRUP kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) untuk “pekerjaan Jalan Tol ibu kota negara (IKN) segmen Karangloang-KKT Kariangau” TA 2022 belum mengungkap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Padahal di kebijakan “peningkatan kualitas perencanaan PBJ” telah diungkap juga bahwa perencanaan harus memperhatikan aspek PBJ berkelanjutan.

Hasil telaah awal terhadap laporan keuangan PUPR (sebagai salah satu pengguna anggaran infrastruktur di IKN) tahun 2022 menunjukkan capaian pengadaan berkelanjutan dari Pembangunan infrastruktur belum dijelaskan di Catatan atas Laporan Keuangan di akun belanja modal dan akun lain yang terkait (PUPR, 2023). Penelaahan dari laporan tahunan, laporan keuangan, dan laporan sustainability tahun 2022 dari rekanan pelaksana pekerjaan tersebut juga menunjukkan belum ada pengungkapan capaian implementasi PBJ berkelanjutan untuk pembangunan jalan tol IKN tersebut (PT. Utama karya, 2023). Hasil telaah awal tersebut menggambarkan bahwa kebijakan pengadaan berkelanjutan belum jelas ukuran capaian implementasinya. Sehingga layak ada 3 (tiga) pertanyaan yang perlu didiskusikan dan atau dijawab. **Pertanyaan pertama;** apa potensi ancaman atau *event* jika kebijakan PBJ berkelanjutan tidak dilaksanakan pada contoh tersebut?

Kebijakan PBJ berkelanjutan memberi arah bahwa belanja pemerintah tidak hanya dirasakan oleh Indonesia tapi juga harus dirasakan oleh lokasi PBJ berada. Data statistik indeks desa mandiri (IDM) 2022 di Provinsi Kalimantan Timur (Kemendesa, 2023) menunjukkan; ada 69,56% atau 585 dari 841 desa di pemerintah kabupaten se-Provinsi Kaltim belum sesuai target desa mandiri. Analisa deskriptif dari 585 IDM

desa tersebut menunjukkan bahwa secara umum desa di provinsi Kaltim mempunyai *mean* terendah di indeks kemandirian ekonomi (IKE). Hal ini bisa memberi *insights* berupa masih ada potensi ketimpangan pembangunan “ekonomi” antar desa dari 585 desa tersebut.

IKE versi IDM ini semakna dengan aspek sosial di pengadaan berkelanjutan, yaitu mandat jaminan keadilan dalam pelibatan penggunaan tenaga kerja local. Sedangkan, pertumbuhan tenaga kerja di provinsi Kalimantan timur di sektor usaha kecil menurun sebesar -0,703 atau minus (Kamal, 2023). Analisa awal terhadap data kaltim tersebut memberi sinyal jawaban pertanyaan pertama. Jika kebijakan PBJ berkelanjutan “tidak dijalankan”, maka potensi ancaman berupa ketimpangan perekonomian semakin meningkat dan dampak negatif di sosial berpotensi akan terjadi di provinsi Kalimantan timur.

Pertanyaan kedua; apa peluang yang kemungkinan hilang dari contoh tersebut? Di setiap belanja pemerintah pasti ada dampaknya. Namun dampak positif tentu diharapkan dapat dinikmati oleh Masyarakat dan atau pelaku usaha lokal di sekitar lokasi PBJ. Sebagai contoh; setiap belanja konstruksi berarti pasti ada tenaga kerjanya. Tenaga kerja lokal harus mendapat peluang untuk menjadi bagian dari sumber daya kontraktor/ rekanannya. jika taksiran proporsi tenaga kerja dari konstruksi

sebesar 20,09% (Hawari et al., 2021), maka taksiran biaya tenaga kerja dari 23 pekerjaan konstruksi di sekitar lokasi IKN yang bernilai Rp10.871.736.968.193,00 (tahun 2023) dapat dihitung sebesar Rp2.184.131.956.909,97 (Kamal, 2023). Angka ini bisa menjadi *trigger* awal peluang pemberdayaan tenaga kerja lokal provinsi Kalimantan timur (tabel 1).

Ada banyak opsi peluang produktivitas tenaga kerja lokal, antara lain dengan cara optimalisasi aspek sosial di sub aspek tenaga kerja lokal dalam PBJ Berkelanjutan. Tabel 1 menunjukkan ada strategi kebijakan belanja infrastruktur berkelanjutan yang dapat memberi sumbangsih mengatasi

pengangguran di sektor konstruksi sebesar 5% (jika opsi ketiga yang digunakan). Peluang ini bisa menjadi opsi tambahan ukuran produktivitas tenaga kerja agar dapat mengatasi tren PDRB provinsi kaltim di lapangan usaha konstruksi yang mengalami tren penurunan dari 9,59% di tahun 2020, 8,95% di tahun 2021, dan menjadi 7,70% di tahun 2022 (BPS, 2023). Angka ini bisa menjadi sinyal potensi *multiplier effect* putaran ekonomi di Kaltim selama proses pembangunan IKN. Bahkan, peluang itu masih bisa dieksplorasi dari belanja infrastruktur pemerintah provinsi kaltim dan pemerintah kabupaten/ kota di lingkungan provinsi kaltim. Gambaran perhitungan awal tersebut memberi *insights* bahwa

Peluang	Uraian Peluang PBJ berkelanjutan (Aspek TK Lokal)	Perhitungan
	20% taksiran biaya tenaga kerja dari 23 paket konstruksi	Rp2.184.131.956.910
	Upah minimum provinsi kaltim 2023	Rp3.201.396
	Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan / bulan	682.244
23 PK IKN	Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan / 12 bulan	56.854
	Pengangguran di provinsi kaltim 2023	103.565
Opsi 1	Strategi kebijakan belanja infrastruktur; minimal 50% TK lokal	28.427
	Peluang kebijakan PBJ berkelanjutan <i>support</i> atasi pengangguran	27%
Opsi 2	Strategi kebijakan belanja infrastruktur; minimal 30% TK lokal	17.056
	Peluang kebijakan PBJ berkelanjutan <i>support</i> atasi pengangguran	16%
Opsi 3	Strategi kebijakan belanja infrastruktur; minimal 10% TK lokal	5.685
	Peluang kebijakan PBJ berkelanjutan <i>support</i> atasi pengangguran	5%

Tabel 1. Contoh optimalisasi peluang dari kebijakan PBJ berkelanjutan di Kaltim

Sumber: Olahan penulis dari berbagai sumber (BPS, diskominfo kaltim, databoks, dll)

jika kebijakan PBJ berkelanjutan “tidak diterapkan” maka peluang mengatasi permasalahan pengangguran tidak digunakan. Padahal bisa dan hampir setiap tahun dapat diprediksi dengan memadai. Hal ini butuh ketulusan kebijakan berbasis data.

Pertanyaan ketiga; bagaimana strategi pengembangan implementasi kebijakan PBJ berkelanjutan? Jika ditinjau dari jawaban atas dua pertanyaan sebelumnya, maka sesungguhnya terungkap bahwa capaian tujuan pengadaan berkelanjutan belum jelas. Ini menunjukkan ada sesuatu yang menghambat tujuan tersebut. Sedangkan, segala sesuatu yang berpotensi menghambat tujuan dapat disebut sebagai

risiko dan instansi pemerintah harus melakukan penilaian risiko dan merancang pengendalian sesuai hasil penilaian risiko (PP 60/2008). Ketidakjelasan ukuran capaian kebijakan pengadaan berkelanjutan bisa menjadi cermin dari wujud efek dari ketidakpastian sasaran Pembangunan nasional atau risiko Pembangunan nasional (Perpres 39/2023). Oleh karena itu, strategi pengembangan implementasi kebijakan pengadaan berkelanjutan perlu didukung dengan manajemen risiko Pembangunan nasional (MRPN) lintas sektor.

Prinsip penerapan MRPN harus integral dengan proses bisnis manajemen pengadaan berkelanjutan sesuai SNI



Gambar 1. PBJ berkelanjutan dan SR sesuai tipe stakeholder

Sumber: Olahan penulis dari Perpres 16/2018 jo 12/2021, PP 60/2008, Perpres 39/2023 dan SNI 20400:2017

20400:2017 (BSSN, 2019). Pengelolaan "*sustainability risks*" dapat diarahkan mencakup 3 (tiga) aktivitas, yaitu, mengidentifikasi risiko jangka pendek, menengah, dan panjang, mengintegrasikan aktivitas pengelolaan "*sustainability risks*" dalam proses bisnis, serta implementasi pengelolaannya secara hati-hati (SNI 20400:2017). Strategi pengembangan implementasi kebijakan pengadaan berkelanjutan dapat dikembangkan dengan kebijakan pengadaan berkelanjutan berbasis risiko lintas sektor (gambar 1).

Gambar 1 menunjukkan visualisasi strategi kebijakan pengadaan berkelanjutan berbasis risiko lintas sektor. Ada minimal 4 (empat) Langkah yang layak dipertimbangkan:

1. Enam kebijakan pengadaan menjadi pijakan utama

Pelaksanaan kebijakan pengadaan berkelanjutan harus dilakukan dalam koridor menjalankan kebijakan:

- meningkatkan kualitas perencanaan PBJ;
- melaksanakan PBJ yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia PBJ;
- mengembangkan *E-marketplace* PBJ;
- menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- mendorong PBJ dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI).

2. Integrasi MPRN ke dalam kebijakan pengadaan berkelanjutan

Struktur MPRN lintas sektor terdiri atas; Unit pemilik risiko lintas sektor dan Pengawas Intern Lintas Sektor. Pemilik risiko sektor ekonomi, sektor sosial, dan sektor lingkungan perlu ditentukan. Proses MPRN harus melekat di setiap perencanaan, persiapan, pemilihan, dan pelaksanaan PBJ serta untuk multi sektor dan untuk setiap risiko jangka pendek, menengah dan panjang.

3. Pimpinan KLPD harus mengembangkan Tata Kelola, manajemen risiko dan pengendalian yang dibutuhkan dalam kebijakan pengadaan berkelanjutan

Desain integrasi kebijakan dan tujuan pengadaan harus dirancang oleh pimpinan KLPD. Para pimpinan harus peduli dengan pengembangan akuntabilitas yang jelas di pengadaan berkelanjutan. Pimpinan instansi harus tinggalkan pola pikir "silo" ego sektoral atau pun ego instansi. Seluruh belanja pengadaan harus mampu meningkatkan produktivitas:

- rekanan dalam menghasilkan BJ yang berkualitas, terutama usaha kecil, mikro, dan koperasi
- usaha lokal dan tenaga kerja lokal di sekitar lokasi pengadaan (mandat pengadaan berkelanjutan) agar bisa menjadi *leverage* pertumbuhan daerah.

- para peneliti dan inovator berupa hasil riset yang dapat digunakan dan atau mendukung efektivitas 8 tujuan pengadaan.

4. Risiko lintas sektor berupa SR 1, SR 2, dan SR 3 harus diidentifikasi, dikelola, dan dilaporkan

Sustainability risk di tipe pemangku kepentingan 1 (SR 1) harus diidentifikasi dan dipersiapkan mitigasinya. Sedangkan SR 2 dan SR 3 harus diidentifikasi dan ditelaah jangkauan pengendaliannya. Apakah *controllable* atau *uncontrollable* karena risiko lintas sektor yang harus dikelola dengan pemantauan dan saling kroscek bersama. Akselerasi penerapan *digital government* (sesuai kebijakan

nomor 5) perlu dilakukan agar "*honesty is best policy*" semakin membumi seiring dengan implementasi kebijakan pengadaan berkelanjutan. Setiap masyarakat seharusnya bisa mendapat akses kepada setiap kegiatan dan kebijakan pemerintah. Produktivitas anak bangsa mendapat dukungan sungguh-sungguh melalui penerapan sistem satu data dan satu platform manajemen data untuk pengelolaan risiko lintas sektor di pengadaan berkelanjutan. Berbagi data adalah hal yang urgen sebagai ujian kesungguhan *digital government*, sebagai bagian dari komitmen kuat untuk menghilangkan ego sektoral menuju visi besar, yakni Indonesia Emas Tahun 2045.

Referensi

- BPKP, 2014, *Analisis Kebijakan Publik*, Modul sertifikasi auditor madya, Pusdiklatwas BPKP, Bogor.
- Kamal, M. dan Bahar, U. *Analisis Politik Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Jurnal Pro Justice, Vol. 1 No. 02 (2019). <http://ejournal.billfath.ac.id/index.php/projustice/article/view/55/45>
- PUPR, 2023, *Laporan keuangan PUPR 2022*.
- Hutama Karya, 2023, *Laporan Tahunan Utama Karya 2022*.
- Hutama Karya, 2023, *Laporan Keuangan Utama Karya 2022*.
- Hutama Karya, 2023, *Laporan Sustainability Utama Karya 2022*.
- Hawari, R. A., Oktaviani, C. Z., & Nurisra, N. (2021). *Komposisi Biaya Sumber Daya Material dan Tenaga Kerja Pada Proyek Konstruksi Bangunan Gedung Sederhana*. Journal of The Civil Engineering Student, 3 (2). <https://doi.org/10.24815/journalces.v3i2.14448>
- Kamal, M. (2023), *Optimasi Artificial Intelligence Dalam Audit Intern Pengadaan Berkelanjutan Di Ibu Kota Negara*, makalah karya tulis ilmiah HUT BPKP tahun 2023, tidak dipublikasikan.
- BPS, 2023, *Statistik perekonomian provinsi Kalimantan timur 2022*.
- Kamal, M. (2020). *Analisis Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Berkelanjutan*. Jurnal Transformasi Administrasi, 10(02), 131–142.
- Kemendesa, 2023, *IDM Desa 2022*. <https://idm.kemendesa.go.id/view/detil/3/publikasi>
- Diskominfo kaltim, 2023, *tingkat pengangguran terbuka*, <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/statistik/tingkat-pengangguran-terbuka-kaltim-turun-04-persen>
- Annur, 2022, *Daftar UMP 2023 di Pulau Kalimantan, Provinsi Mana Tertinggi?*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/30/daftar-ump-2023-di-pulau-kalimantan-provinsi-mana-tertinggi>
- BNSP, 2019, SNI 20400:2017 *Sustainable procurement standard*.

Preview Kolom Ilmiah

KAJIAN TEORITIS *SUSTAINABLE FINANCE* DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*

Perubahan iklim menjadi tantangan serius di abad ini, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Transisi ke energi hijau dan ramah lingkungan merupakan suatu keniscayaan yang memerlukan investasi yang besar, yang tidak dapat hanya bergantung pada sumber dana publik. Peran sektor swasta dalam *sustainable finance* atau keuangan berkelanjutan menjadi semakin penting dalam mendukung perubahan ini.

Studi literatur menunjukkan perkembangan konsep keuangan berkelanjutan dari waktu ke waktu. Dari fokus awal hanya pada profit, konsep ini

berkembang menjadi pendekatan yang lebih inklusif, yang memasukkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam pengambilan keputusan finansial. Berbagai pandangan dan teori mencerminkan evolusi ini.

Pada kesempatan ini artikel yang ditulis oleh Ahmad Fahrian Aditya, S.E., Ak., M.P.A mengajak pembaca untuk mengubah pola pikir berkelanjutan. Dalam keseluruhan konteks ini, keuangan berkelanjutan menjadi instrumen penting dalam memitigasi perubahan iklim dan masalah sosial. Dengan kerja sama yang baik antara sektor publik dan swasta, kita dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan. Selengkapnya dapat dibaca pada rubrik kolom ilmiah.



PERAN AUDITOR INTERNAL DALAM MENGAWAL PENGELOLAAN RISIKO REPUTASI BUMN

Sebagai auditor internal pemerintah, peran strategis dalam menjaga reputasi BUMN tentu sangat diharapkan. Pengawasan yang dapat dilakukan mencakup beberapa aspek, yaitu: aspek pengawasan keuangan dan kinerja, aspek audit dan evaluasi, aspek pencegahan dan penanganan masalah, aspek pelaporan dan transparansi.

Dalam konteks menjaga reputasi BUMN, pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa BUMN menjalankan kegiatannya dengan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabel. Perlu dorongan bagi pihak yang berkepentingan agar BUMN dapat dikelola secara efisien. Melalui pengawasan dan audit yang tepat, sehingga auditor internal dapat membantu mencegah praktik-praktik korupsi dan penyelewengan wewenang yang berpotensi merugikan negara serta berdampak pada potensi merusak reputasi BUMN.

Beberapa hambatan dan kendala masih ditemui dalam pengawasan pengelolaan risiko reputasi, antara lain menyangkut: keterbatasan SDM, kompleksitas BUMN, koordinasi antar lembaga,

tantangan hukum, resistensi dan interferensi, perubahan lingkungan bisnis, akses data dan transparansi informasi, kesadaran risiko, kewenangan.

Dr. Daryanto Ak.,
GDipCom., MComm., M.I.S, CA,
QIA, QGIA, CGCAE, CIAE, CREL,
CGRE, Askom selaku Auditor
Ahli Utama di Deputi Bidang
Pengawasan Instansi Pemerintah
Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan, Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan dalam
kolom ilmiah kali ini membahas
Peran Auditor Internal dalam
Mengawal Pengelolaan Risiko
Reputasi BUMN. Artikel ini
diharapkan dapat melengkapi
pemahaman dalam menjaga dan
mengelola reputasi Selengkapnya
dapat dibaca pada rubrik kolom
ilmiah.



**Pertanyaan:**

Apakah Peraturan Kepala PUSBIN JFA Nomor 60 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui penyesuaian/Inpassing masih berlaku dan dapat digunakan sebagai acuan untuk pengusulan Inpassing Auditor APIP Daerah tahun 2023/2024?

Ika Fajriyah Saraswati

Jawaban:

Sehubungan dengan pertanyaan Ibu Ika Fajriyah Saraswati, kami sampaikan bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf d Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, disebutkan bahwa perpindahan antar Jabatan dilaksanakan antar JF, JA, atau JPT, yaitu pejabat pelaksana ke dalam JF keterampilan dan JF ahli pertama. Berdasarkan ketentuan tersebut, jika pegawai tersebut menduduki jabatan pelaksana/staf/Jabatan Fungsional Umum, maka pegawai tersebut dapat diangkat dalam JFA jenjang Ahli Pertama.

Namun kami menyarankan, apabila pegawai tersebut telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti Diklat Penjenjangan Ahli Muda, maka tidak menjadi masalah jika pegawai tersebut didaftarkan dan mengikuti serta lulus diklat Auditor Ahli Muda.

Setelah diangkat dalam JFA Auditor Ahli Pertama, pegawai tersebut dapat mengumpulkan angka kredit hingga memenuhi persyaratan dan telah lulus diklat dan sertifikasi Auditor Ahli Muda sebagai persyaratan Uji Kompetensi yang telah diikuti sebelumnya, barulah dapat diangkat dalam jabatan Auditor Ahli Muda. Selain itu, pengangkatan dalam jabatan Auditor Ahli Muda harus memperhatikan formasi JFA.

**Salam,
Kapusbin JFA, Iwan Agung Prasetyo**



Pertanyaan:

Apakah persyaratan mengikuti pelatihan fungsional auditor terampil dan ahli pertama untuk tahun depan?

APIP Pemerintah Daerah dan Kementerian

Jawaban:

Persyaratan mengikuti pelatihan fungsional auditor untuk tahun 2024, akan merujuk ke Peraturan BPKP nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi dan Uji Kompetensi bagi JFA.

Persyaratan mengikuti **Pelatihan Fungsional Auditor Terampil** adalah sebagai berikut:

- Berstatus PNS;
- Berijazah paling rendah program vokasi diploma tiga program studi ekonomi, akuntansi, manajemen, administrasi publik, atau administrasi bisnis atau program studi lain yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Auditor yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk kategori keterampilan;
- Diusulkan oleh PPK, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia atau Pimpinan APIP yang bersangkutan.

Persyaratan mengikuti **Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Pertama** adalah sebagai berikut:

- Berstatus PNS;
- Berijazah paling rendah, program akademik sarjana strata satu dengan program studi ekonomi, ilmu atau sains akuntansi, ilmu atau sains manajemen, administrasi publik, atau administrasi bisnis, atau program studi lain yang relevan dengan bidang tugas JFA, atau program vokasi diploma empat dengan program studi ekonomi, akuntansi, manajemen, administrasi publik, atau administrasi bisnis atau program studi lain yang relevan dengan bidang tugas JFA yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk kategori keahlian;
- Diusulkan oleh PPK, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia atau Pimpinan APIP yang bersangkutan.

Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran pelatihan fungsional auditor terampil dan ahli pertama adalah:

- Salinan Surat Keputusan Calon PNS atau Surat Keputusan PNS;
- Salinan Ijazah;
- Salinan Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan bagi PNS yang telah diangkat dalam JFA.
- Surat usulan mengikuti pelatihan yang diusulkan oleh PPK, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia atau Pimpinan APIP yang bersangkutan.

Pelatihan Fungsional Auditor Terampil dan Ahli Pertama diperuntukkan bagi:

- PNS yang telah diangkat dalam JFA melalui pengangkatan pertama;
- PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui perpindahan jabatan;
- PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui promosi;
- Auditor kategori keterampilan yang akan diangkat dalam Jabatan Auditor kategori keahlian; dan
- Auditor yang akan diangkat dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;
- Calon PNS dan PNS yang akan diangkat dalam JFA melalui pengangkatan pertama.

Persyaratan mengikuti Pelatihan Fungsional Auditor melalui perpindahan jabatan adalah sebagai berikut:

- **Terampil**

- Berijazah program vokasi diploma tiga dengan program studi ekonomi, akuntansi, manajemen, administrasi publik, atau administrasi bisnis atau program studi lain yang relevan dengan bidang tugas JFA yang ditentukan oleh BPKP untuk kategori keterampilan;
- Nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- Usia paling tinggi 2 (dua) tahun sebelum batas usia pengangkatan sesuai jenjang jabatan;
- Diusulkan oleh PPPK, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia atau Pimpinan APIP yang bersangkutan.

- **Ahli Pertama**

- Berijazah paling rendah program akademik sarjana strata satu pada program studi ekonomi, ilmu atau sains akuntansi, ilmu atau sains manajemen, administrasi publik, atau administrasi bisnis, atau program vokasi diplomasi

empat pada program studi ekonomi, akuntansi, manajemen, atau administrasi bisnis atau program studi lain yang relevan dengan bidang tugas JFA yang ditentukan oleh BPKP untuk kategori keahlian;

- Nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- Usia paling tinggi 2 (dua) tahun sebelum batas usia pengangkatan sesuai jenjang jabatan;
- Diusulkan oleh PPK, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia atau Pimpinan APIP yang bersangkutan.

Untuk dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran pelatihan meliputi:

- Salinan Surat Keputusan PNS;
- Salinan Surat Keputusan pangkat terakhir;
- Salinan Surat Keputusan jabatan terakhir;
- Salinan ijazah yang diakui secara kedinasan;
- Salinan penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir;
- Dokumen hasil seleksi internal.

Semua dokumen pendukung persyaratan tersebut di atas, harus diupload dalam <https://registrasi.bpkp.go.id/registrasi/> dengan kode kalender yang tertera sesuai jenjang. Selanjutnya, dokumen akan diverifikasi oleh Pusdiklatwas BPKP, apakah calon peserta bisa memenuhi syarat atau tidak menjadi peserta pelatihan. Peserta yang telah memenuhi syarat, akan diikuti dalam pelatihan sesuai jadwal yang tersedia di kalender pelatihan setelah ada konfirmasi kesediaan oleh tim Pusdiklatwas.

Bagi peserta yang belum memenuhi syarat, bisa melengkapi kekurangan data/ dokumennya sesuai hasil verifikasi yang dituangkan dalam catatan di registrasi *online*.

Salam,
Kapusdiklatwas, R. Ersi Soenarsih

Pembaca, rubrik ini kami sediakan untuk Anda yang mempunyai masalah dengan Jabatan Fungsional Auditor (JFA), baik seputar aturan-aturan JFA, angka kredit maupun sertifikasinya. Pengasuh rubrik ini adalah Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, Iwan Agung Prasetyo dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, R. Ersi Soenarsih. Surat yang Anda layangkan untuk rubrik ini, hendaknya ditujukan ke wartapengawasan@gmail.com atau redaksi **Warta Pengawasan**.



Bang Onim

Duta Relawan Kemanusiaan Indonesia di Palestina

Sudah 15 tahun lamanya **Abdillah Onim** atau akrab disapa Bang Onim menjadi relawan kemanusiaan untuk membantu sesama. Bukan di Indonesia melainkan di jalur Gaza, Palestina. Ya, nama Bang Onim menjadi buah bibir di pelbagai pemberitaan baik di media massa maupun lini masa

media sosial. Pria kelahiran 12 Juni 1979 sudah menjadi relawan kemanusiaan dengan menolong saudara sebangsa dan setanah air yang tertimpa musibah sejak tahun 1999. Pengalaman-pengalaman itulah yang membuatnya tergerak untuk turut serta dalam perdamaian antara Palestina dan Israel.

Sejak lulus kuliah dari Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2008 lalu, Bang Onim membulatkan tekad untuk berangkat ke Gaza. Niatnya hanya satu, yakni menghadirkan kedamaian bagi warga Palestina. Kenapa demikian? Berdasarkan penuturan Bang Onim, bila ditarik dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, ada peran Palestina yang menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia.

Menurutnya, bentuk dukungan Palestina terhadap kemerdekaan Indonesia juga terlihat ketika Palestina melobi negara-negara di kawasan Timur Tengah yang berdaulat di Liga Arab untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. "Apalagi jika mengacu kepada Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan," katanya.

Sebelum benar-benar bertolak ke Gaza, Onim harus mendapatkan restu orang tua dan keluarga besarnya. Kala itu dirinya mendapatkan penolakan untuk pergi ke Gaza. Orang tua dan keluarganya takut anaknya hanya tinggal nama. Tapi, berkat kegigihannya menjelaskan perihal arti dan makna perjuangan, akhirnya orang tua beserta sanak famili mengizinkan Onim berangkat ke Gaza.

Perjuangannya tidak berhenti disitu saja, sebelum berangkat ke Gaza Onim lebih dulu belajar Bahasa Arab. Hal itu menjadi modal dasar untuk bisa membantu sesama. Dirinya saat itu yakin, rakyat Palestina tentu sangat membutuhkan sosok pemuda dengan jiwa juang, pemberani, supel, *flexible*, mobilitas tinggi dan, paham makna amanah, paham makna agama dan tahu apa yang diperjuangkan. Ya, semua hal itu ada dalam dirinya.

Ia pertama kali terjun ke dunia relawan di Palestina pada 2009. Ketika itu Onim berada di bawah MER-C (Medical Emergency Rescue Committee). MER-C sejak 2008 sudah melangsungkan misi kemanusiaan di Gaza yang kala itu juga menghadapi invasi dari



Israel. Selama di MER-C, Onim pernah bertugas menjadi Ketua Cabang Jalur Gaza. Pada masa kepemimpinan Bang Onim pula, program Rumah Sakit Indonesia di Gaza lahir.

Diakuinya, sejak menginjak kaki di Tanah Gaza, Palestin banyak tantangan, rintangan serta resiko menjadi target pembunuhan oleh militer Israel. Tantangan lain yang harus dihadapi adalah fitnah yang bersliweran. "Saya punya keyakinan bahwa dalam berbuat kebaikan, tidak semua yang searah dengan kita, pasti ada yang tidak suka melihat kegiatan kita," ujarnya.

Pendiri NPC

Malang melintang dalam dunia relawan membuatnya berpikir untuk menginisiasi

sebuah lembaga yang bernama Nusantara Palestina Center. Inisiatif pendirian NPC didasari oleh keterpanggilan Bang Onim atas situasi jalur Gaza yang membutuhkan dukungan secara berkala, Palestina dan Indonesia untuk terus meningkatkan kinerja dan kapasitas dirinya serta tim untuk bekerja secara konsisten, transparan, dan profesional seperti dasar dan prinsip kerja yang dijalankan selama ini.

Onim juga menekankan semangat kolaborasi dan kolektivitas yang harus dimiliki oleh seluruh staf dan relawan. Bentuk perwujudan hal tersebut, NPC sebagai Jembatan Amanah Indonesia untuk Palestina memiliki lebih dari 100 mitra dari berbagai lembaga sosial, komunitas dan institusi. Bersama tim di Gaza





facebook, twitter **@Abdillahonim**, Instagram **@bangonim**, serta Youtube **AbdillahOnimDaily** atau **bangonimchannel**.

Hal tersebut dilakukan Onim agar masyarakat Indonesia dapat mengetahui pemberitaan terkini mengenai kondisi yang terjadi disana. Saking *update*-nya, Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi pun sering menghubungi Bang Onim untuk mengetahui kondisi terkini Gaza.

dan mitra tersebut Bang Onim mengawal jalannya kegiatan dan program yang telah banyak membawa kemanfaatan dan membantu masyarakat Palestina.

Adapun bantuan yang disalurkan pun sangat beragam, seperti makanan, obat-obatan, dan ambulans. Dia juga merupakan penggagas program OTA Yatim Palestina, pendiri sekolah gratis TK Nurani Indonesia di Gaza, pendiri kantor berita Suara Palestina di Gaza dan bermitra dengan lebih dari 50 NGO Indonesia dan NGO Internasional. "NPC lembaga kemanusiaan ini bergerak di sektor pendidikan dan kemanusiaan, dan juga menjadi mata dan telinga Indonesia di Palestina,"

Bang Onim pun aktif mengabarkan kondisi terkini Palestina melalui sejumlah media sosialnya,

Atas jasa-jasa yang dilakukan kepada Palestina Bang Onim mendapatkan penghargaan yang langsung diserahkan Wakil Menteri Kebudayaan Palestina, Dr Anwar Bar'awy. Kemudian, pada 2019 lalu, Pemerintah Palestina memberikan penghargaan kepada Onim. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh pada saat perayaan HUT ke-74 RI di Taman Bisan, Bait Lahiyah, Gaza Utara, Sabtu 17 Agustus 2019 silam.

Satu setengah dasawarsa menjalankan misi kemanusiaan di Jalur Gaza bukanlah waktu yang singkat dan bukanlah sebuah pilihan mudah. Terdapat banyak tantangan maupun rintangan dalam menjalankan amanah dari masyarakat Indonesia. Namun, berkat kegigihan dalam menolong sesama dan dukungan masyarakat Indonesia, Bang Onim akan terus melanjutkan perjuangan kemanusiaannya.

(Fuad Rizky)

BERGELUT DI TENGAH LAUT



Santiago, seorang nelayan tua dari Kuba, sudah delapan puluh empat hari pulang melaut dengan tangan hampa. Ia dicap sebagai *salao* (sangat sial). Bahkan, bocah yang biasa ikut di perahunya pun dipaksa oleh orang tuanya untuk pindah melaut dengan perahu lain. Akan tetapi, yang patut dicatat dari Santiago adalah semangat dan kegigihannya. Hal itulah yang membuatnya memutuskan tetap melaut meski harus berangkat sendirian. Maka, di hari kedelapan puluh lima, Santiago sudah bersiap dan berangkat sejak pagi-pagi

buta. Tekadnya bulat, ia harus berhasil menangkap sesuatu dan memperbaiki peruntungannya.

Ia tidak sepenuhnya salah. Hari itu ia ternyata nasibnya mulai membaik. Seekor ikan besar, yang ia awalnya tidak yakin berjenis apa, menyambar kailnya. Akan tetapi, di sinilah ternyata keteguhannya diuji. Tangkapannya hari itu begitu besar dan kuat sampai-sampai ia tidak bisa mengangkatnya. Malahan, ikan tersebut terus menyeret sampannya dan membawanya jauh ke tengah lautan. Ternyata pergulatan

mereka tidak selesai dalam sehari. Hari berganti, mereka bertarung berkali-kali, tetapi baik Santiago maupun ikan marlin itu masih belum juga menyerah. Dalam keadaan terpencil dan kesusahan di tengah lautan, Santiago pun mulai bergelut dengan pikirannya sendiri. Lalu, bagaimanakah akhirnya? Apakah Santiago berhasil mendaratkan ikan tersebut di sampannya? Atau malah kesialannya berlanjut dan ikan tersebut gagal ia tangkap?

Buku ini menjadi menarik karena dapat dianggap sebagai simbol perjuangan kehidupan, usaha dan hasil serta perenungan hidup dan mati. Dalam pelayarannya, Santiago tidak hanya berusaha menaklukkan ikan marlin besar tersebut. Ia juga bertarung dengan dirinya sendiri. Bahkan, lama-kelamaan ia merasa bisa memahami ikan tersebut

lewat benang kailnya dan membandingkan situasi mereka berdua. Dalam kepayahannya pula, Santiago membawa pembaca merenung melalui monolog-monologinya.

Dapat dimaklumi jika novela ini menjadi salah satu karya Ernest Hemingway paling terkenal. Bahkan, lewat karyanya ini, Hemingway berhasil memenangkan *Pulitzer Prize for Fiction* pada tahun 1953. Selain itu, karena berbentuk novela, ceritanya tidaklah terlalu panjang sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan buku ini relatif singkat. Oleh karena itu, buku ini cocok dibaca saat pembaca merasa terlalu sibuk tetapi masih ingin menyelesaikan buku yang dapat mengajak pembaca berpikir dan merenung. Ditambah lagi, pada saat klimaksnya, ada kejutan yang akan membuat pembaca dalam semakin larut dalam renungan. Akhir kata, selamat membaca dan merenung!

(Gilang Rahmat Hastanto)



Penulis:
Ernest Hemingway

Penerbit:
Narasi

Judul:
Lelaki Tua dan Laut
(*The Old Man and The Sea*)

Halaman:
163 halaman

Kategori:
Fiksi Sastra



CERITA MIMPI DAN ROMANSA

Sang Gadis Peracik Kretek

Kisah perjalanan Lebas (Arya Saloka) mencari Jeng Yah atau Dasiyah (Dian Sastrowardoyo) sosok perempuan yang dikatakan oleh Romo-nya Soeraja (Pritt Timothy) pada saat sang Romo terbaring sekarat. Bermodalkan selembur surat dan foto lama yang diberikan oleh Romonya, Lebas berusaha sangat keras untuk mencari di mana Jeng Yah Berada. Hingga akhirnya Lebas bertemu dengan Arum (Putri Marino) cucu dari pemilik usaha kretek ternama di Kota M pada tahun 1960-an. Bersama dengan Arum, Lebas mencari tulisan dan surat-surat

yang bisa ia baca untuk mencari keberadaan dimana Jeng Yah berada. Setiap tulisan tangan Jeng Yah dibaca, Lebas dan Arum seperti masuk kedalam cerita yang ditulis oleh Jeng Yah.

Flashback ke tahun 1960-an, Dasiyah atau Jeng Yah adalah seorang gadis yang berbeda dengan gadis-gadis seumurannya pada masanya. Alih-alih memasak, menjahit dan melakukan kegiatan selayaknya perempuan lain, Dasiyah berbeda. Dasiyah memiliki mimpi untuk menjadi pembuat saus kretek terbaik agar pabrik

Kretek Merdeka milik orang tuanya Idroes Moeria (Rukman Rosadi) tidak tersaingi oleh rokok kretek lain. Akan tetapi keinginan wanita gigih ini terhalangi oleh aturan-aturan dan norma yang diterapkan di pabrik kretek tersebut di mana wanita tidak boleh masuk ke dalam ruangan saus kretek yang nantinya dipercaya akan menurunkan cita rasa saus kretek tersebut menjadi asam.

Di suatu hari, Idroes membawa seorang pria yang ia temukan hampir sekarat di pasar dan mempekerjakan laki-laki tersebut di pabrik kretek yang ia miliki. Laki-laki itu ialah Soeraja (Ario Bayu) di masa muda. Seiring setelah Soeraja bekerja di pabrik

kretek tersebut, Dasiyah merasa Soeraja mendukung apa yang ia lakukan. Rasa cinta mulai timbul diantara mereka berdua. Akan tetapi harapan Dasiyah sirna ketika dia mengetahui bahwa dirinya akan dijodohkan oleh Seno Aji (Ibnu Jamil) oleh orang tuanya. Konflik pun mulai muncul antara keluarga Dasiyah dengan Soeraja yang secara terang-terangan menyatakan diri mencintai Dasiyah kepada orang tuanya. Soeraja akhirnya diusir oleh Idroes yang berfikir jika Soeraja telah menghancurkan rencana pernikahan anaknya dengan Seno Aji.

Selang beberapa waktu, setelah memiliki cukup keberanian akhirnya Soeraja mendatangi



Idroes di sebuah kedai kretek dan meyakinkan kepada Idroes bahwa putrinya tersebut adalah peracik saus kretek yang handal. Akhirnya Idroes tersadar setelah menikmati lintingan hasil kretek yang telah diberikan saus buatan Dasiyah. Hingga Akhirnya Idroes menerima kembali Soeraja dan akhirnya usaha kretek mereka mengeluarkan rasa baru dari saus kretek yang dibuat oleh Dasiyah.

Setelah dari peluncuran kretek baru tersebut, semakin banyak konflik-konflik yang bermunculan. Salah satunya adalah sang kompetitor dari Kretek Merdeka milik Soedjagad (Verdi Solaiman) yaitu Kretek Proklamasi tidak bisa tinggal diam melihat kesuksesan Idreos mengenalkan produk terbarunya. Dengan menggunakan segala cara, Soedjagad berusaha menjatuhkan keluarga Idroes, salah satu cara yang ia gunakan adalah dengan menggunakan kekuasaannya untuk memasukkan nama Idroes kedalam daftar nama orang yang tergabung kedalam PKI. Konflik lainnya adalah konflik antara Soeraja dan Seno Aji. Seno Aji yang merupakan tentara, berhasil menemukan histori dari Soeraja yang dahulu pernah menjadi antek-antek Belanda. Seno Aji berniat untuk menjatuhkan Soeraja di depan Idroes dengan menggunakan fakta-fakta yang iya temukan tersebut.

Masih banyak konflik yang sangat menarik yang disajikan di dalam serial ini seperti penangkapan

Idroes dan Dasiyah yang masuk kedalam daftar nama orang yang terlibat PKI, penyekapan Dasiyah, Soeraja yang akhirnya takluk kepada Soedjagad, dan pertemuan antara Soeraja dan Dasiyah di sebuah stasiun Kereta. Semua hal tersebut tertuang ke dalam tulisan surat ataupun curahan yang dituliskan oleh Dasiyah dan Soeraja.

Kembali di masa sekarang, seiring banyaknya surat dan tulisan Dasiyah dan Soeraja yang dibaca, banyak fakta mengejutkan yang akhirnya diketahui oleh Lebas dan Arum. Banyak sekali *plot twist* yang tersaji dalam Serial ini. Jalan cerita yang panjang dan intens juga tidak bisa penulis ceritakan secara terperinci. Serial yang memiliki 5 episode ini dibintangi oleh banyak sekali artis-artis kenamaan Indonesia. Film yang disutradarai oleh Kamila Andini dan Ifa Isfansyah ini tak hanya menyoroti suksesnya bisnis kretek pada tahun 1960-an. Film ini juga memberikan pelajaran akan gigihnya perjuangan Dasiyah dalam mengejar cinta dan cita-citanya untuk menjadi peracik saus kretek terbaik. Selain menyajikan cerita romansa dan persaingan industri kretek pada masa itu, film ini juga sukses merefleksikan bagaimana kelamnya peristiwa tahun 1965 di Indonesia yang tidak bisa dilupakan. Disisi lain, usaha yang dilakukan oleh Lebas dan Arum dalam mencari informasi tentang Dasiyah sukses membawa penonton ikut

terjun kedalam masa lalu dan merasakan kesedihan dan haru yang digambarkan dalam situasi tersebut.

Film yang diadaptasi dari novel dengan judul yang sama karya Ratih Kumala ini sukses membuat Penulis tenggelam menikmati jalan cerita film yang secara manis dikemas dan merasakan apa yang dirasakan oleh Dasiyah dan Soeraja. Walaupun jalan cerita dibuat dengan alur maju mundur, tetapi Kamila dan kawan-kawan sukses menyajikannya dengan sangat mudah dipahami dan dinikmati. Setiap Episode yang Penulis tonton, pasti ada *plot twist* atau hal yang membuat Penulis tak menyangka akan disajikan di film ini. Terlebih lagi, dari segi visual bisa dibilang Kamila dan Ifa sangat memperhatikannya. Suasana pedesaan yang asri dan sejuk, bangunan-bangunan tua, rumah-rumah dan pasar tradisional sukses divisualisasikan dengan sangat matang. Pengambilan komposisi gambar dan warna yang digunakan sangatlah menggambarkan suasana era tahun 1960-an. Setiap detail visual dan properti sangatlah diperhatikan oleh tim visual dari film ini. Salah satu hal yang menarik adalah penggunaan telepon selular jadul yang menambah kesan *vintage* pada era 2000-an yang sangat kental.

Film yang rilis pada tanggal 2 November 2023 ini bisa kalian jadikan referensi untuk menikmati akhir pekan anda. Film

ini bisa anda saksikan pada salah satu *platform streaming* film online yaitu Netflix. Jangan lupa siapkan cemilan dan ajak teman atau keluarga terdekat anda untuk menyaksikan film ini Bersama-sama. Selamat kembali ke masa Indonesia di era 60-an yang disajikan dengan sangat indah oleh Gadis Kretek.

(Bintang A. Marta)



Judul: **Gadis Kretek**

Waktu Rilis: **2 November 2023**

Sutradara: **Kamila Andini dan Ifa Isfansyah**

Penulis: **Ratih Kumala**

Produser: **Shanty Harmayn**

Pemain: **Dian Sastrowardoyo, Ario Bayu, Putri Marino, Arya Saloka, Ibnu Jamil, Tissa Biani, Sheila Dara, Sha Ine Febriyanti, Ine Febriyanti, Winky Wiryawan**

Musik: **Nadin Amizah**

Editor: **Mirna Yulistiant**

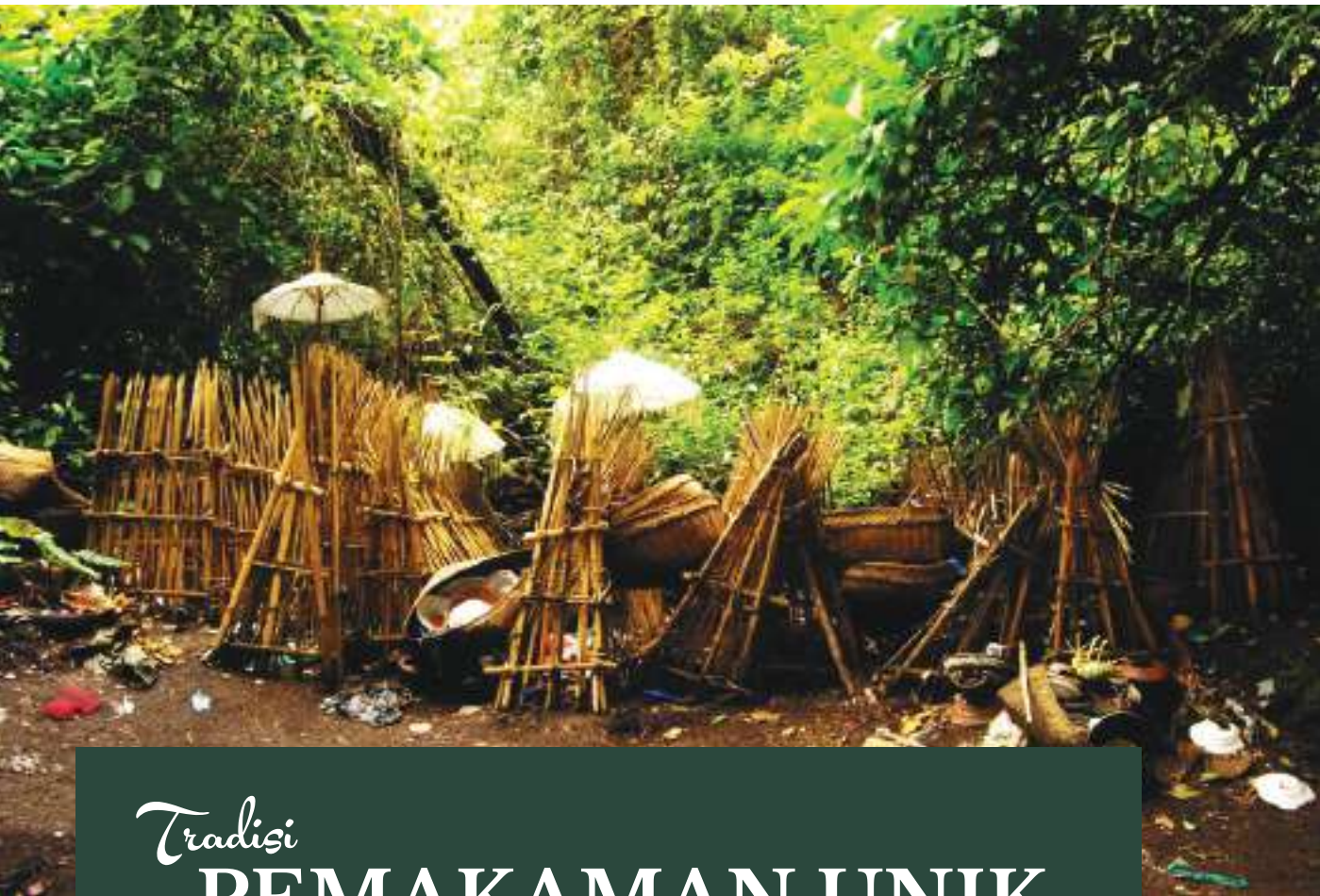
Durasi: **+ 60 Menit, 5 Episode**

Negara Asal: **Indonesia**

KAWAL EKONOMI INDONESIA



Comic by Irma Arisya P.



Tradisi
PEMAKAMAN UNIK
Sebuah Desa di Pulau Dewata





Masuk ke dalam 10 destinasi terpopuler dunia versi TripAdvisor, Bali menjadi salah satu destinasi yang sangat diminati oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Tidak salah lagi, siapa yang tidak terpesona dengan keindahan alam dan wisata budaya di Pulau Dewata?

Kali ini Penulis tidak akan mengulas tentang keindahan alam ataupun pementasan budaya yang ada di Bali, tapi Penulis akan membahas tentang tradisi pemakaman. Iya, sebuah tradisi pemakaman unik di salah satu desa di Bali yang bisa masuk ke dalam *bucket lists* kamu kalau berkunjung ke Pulau Dewata.

Tradisi pemakaman mungkin identik dengan kedukaan, namun siapa sangka bahwa tradisi pemakaman bisa menjadi salah satu keunikan dan daya tarik pariwisata? Pada dasarnya masyarakat Hindu di Bali melakukan upacara kematian dengan cara dibakar atau biasa disebut upacara Ngaben. Pada upacara Ngaben jenazah dibakar di kuburan dan kemudian abunya di lepaskan ke pantai, laut, atau sungai. Namun, desa yang satu ini memiliki tradisi pemakaman yang sangat unik dan berbeda dari masyarakat Hindu-Bali pada umumnya, ya Desa Trunyan.

Berada di tepi timur Danau Batur, Desa Trunyan merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Jika berangkat dari Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, diperlukan waktu tempuh kurang lebih 2 jam untuk 100 km perjalanan. Untuk dapat sampai di Desa Trunyan, kita harus menyebrangi Danau Batur dengan menggunakan perahu motor kecil yang menyusuri lereng Bukit Abang di tepi Danau Batur selama 20 sampai dengan 30 menit. Penyebrangan dapat dilakukan melalui Dermaga Kedisan Danau Batur dengan membeli tiket yang dibanderol mulai 145.000

rupiah untuk wisatawan domestik. Harga tiket masuk ke kawasan tempat kuburan atau pemakaman di Desa Trunyan ini sudah termasuk ke dalam harga tiket dan sewa perahu.

Selama perjalanan menyeberangi danau, kita akan disuguhi pemandangan indah dengan hamparan gunung yang menunjang Gunung Batur dengan air danau yang membiru di kakinya. Sapuan halimun tipis dan belaian angin sepoi-sepoi menjadikan suasana semakin tenang dan memunculkan nuansa mistis.

Tak seperti masyarakat Hindu-Bali pada umumnya, masyarakat Desa Trunyan memiliki tradisi pemakaman yang unik yang dikenal dengan istilah Mepasah. Mepasah dilakukan oleh masyarakat Desa Trunyan dengan meletakkan jenazah dan membiarkannya membusuk di atas tanah dangkal berupa cekungan panjang di bawah pohon Taru Menyan. Pohon Taru Menyan ini konon dipercaya memiliki bau yang sangat harum sehingga mampu menetralsir bau busuk dari mayat yang diletakkan di bawahnya.

Asal-usul tradisi ini bermula pada saat empat anak dari Raja Surakarta mengendus bau harum entah dari mana kemudian mencari asal sumber bau itu ke arah timur. Setelah berhari-hari melakukan perjalanan, akhirnya mereka tiba di Bali dan baunya

semakin semerbak. Perjalanan dilanjutkan hingga menemukan asal bau harum tersebut di Pohon Taru Menyan dimana taru berarti pohon dan menyan berarti harum. Anak pertama dari Raja Surakarta kemudian menetap di daerah itu dan menjadi pemimpin disana. Karena ingin melindungi wilayahnya dari ancaman pihak luar, ketika ada yang wafat, jenazahnya tidak dikubur melainkan didekatkan di pohon Taru Menyan yang kini menjadi tradisi Mepasah di Desa Trunyan.

Namun tidak semua jenazah dapat dimakamkan dengan cara seperti ini, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain meninggal secara wajar, telah menikah, dan anggota tubuh lengkap. Jika seseorang meninggal dengan kondisi jasadnya hancur, cacat, ada cedera yang belum pulih karena sakit seperti cacar atau lepra, atau proses meninggalnya secara dibunuh atau bunuh diri, maka mereka akan disemayamkan dengan cara di kubur di dua wilayah lain di Desa Trunyan.

Memang terkesan mistis dan menakutkan, namun ini menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan karena mereka bisa langsung melihat jasad yang telah menjadi tengkorak secara nyata. Jika mengunjungi Desa Trunyan, wisatawan harus memenuhi beberapa aturan yang ada dengan menghormati untuk tidak berbicara kotor dan tidak mengambil barang apa pun yang

berada di Taru Menyan. Ini akan menjadi pengalaman unik dan berbeda bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali khususnya Desa Trunyan.

Selain mengunjungi pemakaman unik di Desa Trunyan, wisatawan juga dapat mengunjungi beberapa *spot* menarik sekitar Desa Trunyan seperti Pura Pancering Jagat yang menyuguhkan atraksi kesenian tradisional yang diberi nama Barong Brutuk. Bagi masyarakat sekitar, Barong Brutuk merupakan jelmaan dari penguasa di Desa Trunyan. Orang yang memerankan Barong Brutuk merupakan orang-orang terpilih karena harus berpantang dan melakukan penyucian diri selama 42 hari dan tidak berhubungan dengan perempuan. Pemeran dari Barong Brutuk biasanya adalah laki-laki.

Dan ini lah Desa Trunyan dengan segala keunikan dan kecantikannya. Meskipun memiliki kesan mistis, tapi jangan salah, kamu bisa mendapatkan wisata alam dan mengenal budaya serta menambah pengetahuan baru dengan pengalaman yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Jadi gimana? Kamu tertarik *ga* untuk berkunjung ke Desa Trunyan?

(Pande M. Nancy Nareswari)



Teka Teki Sobwas



Mendatar

1. Sudut pandang
4. Kecurangan (bahasa Inggris)
6. Penanaman modal
7. Proses memasukkan barang dari negara lain ke dalam negeri
9. Pemangku kepentingan (bahasa Inggris)
10. Preventif
11. Pembauran (sinonim)
12. Keterbukaan (sinonim)

Menurun

2. Usaha mengalahkan industri dalam suatu negara
3. Taat asas (sinonim)
5. Peraturan
8. Probabilitas

Ketentuan Cara Menjawab:

1. Tulis jawaban di halaman TTS atau di selembar kertas
2. Foto/scan jawaban
3. Kirim jawaban ke: wartapengawasan@gmail.com dengan subjek: Jawaban Teka Teki Sobwas 4/2023
4. Cantumkan Nama Lengkap, Nomer Telepon, Alamat Lengkap, dan Instansi>Nama Kampus (jika ASN/Mahasiswa)

Batas pengiriman jawaban TTS: 31 Januari 2024

Pemenang terpilih akan mendapat hadiah menarik dan diumumkan di Majalah Warta Pengawasan Edisi 1/2024.

Pemenang TTS WP 3/2023:

1. A. M. Firman Dwi Putra, Bangka Belitung
2. Nur Asyiah- Cimanggis, Depok
3. RIZKY AMALIA-PIYUNGAN, BANTUL, DIY.



1st High Level Meeting
ARCHIPELAGIC AND
ISLAND STATES FORUM
INDONESIA 2023



“Pelaksanaan KTT AIS Forum ini merupakan salah satu komitmen Indonesia untuk bekerja sama di level yang lebih tinggi, menjadi organisasi internasional dalam melakukan langkah-langkah konkret untuk penanganan isu kawasan dan isu dunia dan untuk terus menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang dan negara-negara kepulauan.”

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo

Usai Pimpin KTT AIS Forum, Rabu (11/10/2023)
Di Bali Nusa Dua Conference Center, Bali

02

**KAJIAN TEORITIS *SUSTAINABLE FINANCE*
DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN
*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS***

Oleh: Ahmad Fahrian Aditya

13

**PERAN INTERNAL AUDITOR DALAM
MENGAWAL PENGELOLAAN RISIKO
REPUTASI BUMN**

Oleh: Daryanto

KAJIAN TEORITIS **SUSTAINABLE FINANCE** DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Ahmad Fahrian Aditya

Auditor Ahli Pertama di RoSDM Tubel S2 Reentry

Abstract

This research delves into the theoretical landscape of sustainable finance in implementing sustainable development goals. It provides a comprehensive understanding of the key concepts, principles, and frameworks underpinning sustainable finance. The study explores the various perspectives on the role of companies in integrating Environmental, Social, and Governance (ESG) considerations into their decision-making processes. This exploration illuminates the evolving concept of sustainable finance and its theoretical

foundations. Furthermore, the research elucidates the core principles of sustainable finance, emphasizing the importance of long-term value, effective governance, and comprehensive reporting. These principles serve as a fundamental framework for the integration of ESG considerations into financial decision-making. The study also underscores the vital role of the private sector in the realm of sustainable finance, particularly in the context of climate change mitigation and the transition to green energy.

A. Pembukaan

Perubahan iklim, yang diidentifikasi sebagai salah satu ancaman terbesar di abad ke-21, telah memberikan dampak buruk yang nyata pada berbagai aspek kehidupan manusia dan lingkungan

(PBB, 2021; PBB, 2023). Negara-negara berkembang merupakan negara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim dikarenakan struktur ekonomi negara yang banyak bergan-

tung pada penggunaan sumber daya alam seperti perkebunan, pertanian, perhutanan dan pertambangan (UNFCCC, 2006; Frankhauser and McDermott, 2013, IPCC, 2023). Ancaman ini menjadi pusat perhatian dunia, mulai dari kalangan pemerintah, organisasi antarpemerintah, *scientists*, dan korporasi sepakat untuk beralih dari proyek-proyek konvensional yang mengandalkan sumber daya berbasis bahan bakar fosil ke proyek-proyek hijau. Namun, transisi dari bahan bakar fosil ke penggunaan energi yang ramah lingkungan memerlukan sumber daya keuangan yang sangat besar. Komisi Transisi Energi (ETC) (2023) memperkirakan bahwa sekitar \$110 triliun (USD) dalam investasi modal dana yang dibutuhkan untuk beralih dari sumber daya berbasis bahan bakar fosil ke energi terbarukan antara tahun 2021 hingga 2050, dengan investasi modal tahunan rata-rata sebesar \$3,5 triliun (USD). Sementara keuangan yang berasal dari pemerintah memainkan peran penting dalam tahap awal pembiayaan pengembangan transisi energi terbarukan, kapasitasnya untuk mendukung proyek-proyek hijau terbatas (Elgouacem et al. 2019), mengingat besarnya jumlah investasi yang dibutuhkan.

Peran pembiayaan dari sektor swasta dalam transisi proyek hijau semakin mendapatkan perhatian, terutama ketika selaras dengan strategi pemerintah dalam transisi ekonomi hijau serta didukung oleh bank sentral dan regulasi sektor keuangan (Kedward

et al., 2022). Hal ini menekankan pentingnya *sustainable finance*/ keuangan berkelanjutan dari sektor swasta dalam mengatasi tantangan pendanaan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim (Songwe et al., 2022). Namun, pendekatan keuangan berkelanjutan masih terbilang relatif baru di Indonesia, dikarenakan regulasi pendukung baru diimplementasikan pada tahun 2017 melalui POJK No.60 tahun 2017 dibandingkan dengan negara maju seperti Uni Eropa melalui skema penerbitan *green bond* pertama di dunia pada tahun 2007 melalui the European Investment Bank (EIB) (Aditya, 2023). Selanjutnya, sebagai salah satu dari sepuluh kontributor terbesar di dunia terhadap emisi gas rumah kaca (GHG) dikarenakan ketergantungannya terhadap bahan bakar (Friedrich et al., 2023), Indonesia didesak dalam berbagai forum internasional untuk beradaptasi dan mengurangi dampak perubahan iklim dengan salah satunya mengintegrasikan pendekatan keuangan berkelanjutan ke dalam strategi keuangan negaranya. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi kajian teoritis *sustainable finance*/ keuangan berkelanjutan dalam mengimplementasikan *sustainable development* yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan negara terhadap perubahan iklim dan masalah sosial.

B. Kajian Literatur

1. Landasan Teori *Sustainable Finance*

Landasan teori *Sustainable Finance*/ keuangan berkelanjutan te-

rus berkembang dalam kajian literatur akademik, seiring dengan semakin banyaknya perhatian dari kalangan *social scientists* dalam beberapa dekade terakhir terhadap perubahan iklim. Diskursus utama keuangan berkelanjutan dimulai dari standar internasional, dengan eksplorasi yang terbatas mengenai dasar teoritis dalam bidang ini. Pandangan yang dominan dalam debat literatur yang telah ada, berasal dari karya-karya Milton Friedman (1970), yang berpendapat bahwa perusahaan seharusnya hanya berfokus pada memaksimalkan keuntungan, dan menyatakan bahwa masalah-masalah sosial lainnya bisa ditangani melalui *government intervention* atau *individual intervention*. Namun, pandangan ini semakin dipertanyakan oleh pendekatan-pendekatan baru dalam bidang keuangan berkelanjutan. R. Edward Freeman (1984) secara khusus menghadirkan *stakeholder theory* sebagai pendekatan alternatif yang berpandangan bahwa tujuan perusahaan tidak hanya terbatas pada memaksimalkan keuntungan pemegang saham, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat seperti karyawan, pelanggan, masyarakat, pemasok, dan lingkungan. Pandangan ini bertolak belakang dengan *shareholder theory* yang hanya berfokus pada keuntungan perusahaan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham.

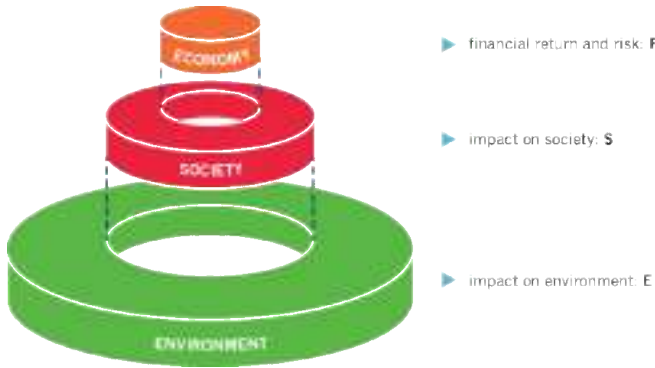
Melalui *stakeholder theory* ini, beberapa *scholars* lain seperti Aydoğan et al., (2022), Liu Z et al., (2022), dan Schoenmaker &

Schramade (2019, hal. 21) berpandangan bahwa perusahaan seharusnya memberikan lebih banyak *value* kepada masyarakat dan lingkungan dengan menekankan pada aspek *Environment, Social, and Governance* (ESG). Sehingga, perusahaan dapat berkontribusi positif dalam mengatasi tantangan sosial dan lingkungan yang mendesak, seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan sosial, dan permasalahan lingkungan. Namun, pandangan ini juga ditentang oleh kalangan ekonom kontemporer seperti Bhagat (2022), yang berargumen bahwa dalam praktiknya sulit bagi perusahaan untuk menyeimbangkan antara ESG dengan keuntungan perusahaan, sehingga ESG terkadang dipakai oleh perusahaan untuk menutupi kegagalan perusahaan ketika mengalami *underperform* dalam memenuhi target pendapatan.

Selanjutnya, jika ditelusuri lebih dalam, landasan teori keuangan berkelanjutan didasarkan pada tiga dimensi pembangunan berkelanjutan/ *sustainable development*: ekonomi, sosial, dan lingkungan (Schoenmaker & Schramade, 2019, hal.15). Pertama, aspek ekonomi dalam keuangan berkelanjutan didasarkan dari mencari keseimbangan antara pertumbuhan dan pembangunan sehingga kegiatan ekonomi dari keuangan berkelanjutan tidak hanya menguntungkan korporasi saja melainkan memberikan kontribusi positif yang lebih luas terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi (Redclift, 1991). Kedua, dimensi sosial dari keuangan berkelanjutan menekankan pada

pengurangan kemiskinan, investasi sosial, kesetaraan, hak asasi manusia, dan pengembangan komunitas. Dimensi ini bertujuan untuk mendorong akses yang adil terhadap sumber daya, meningkatkan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan melindungi hak asasi manusia

(Torjman, 2000). Ketiga, dimensi lingkungan dari keuangan berkelanjutan menaruh perhatian yang signifikan dalam mencapai *sustainable development goals* (SDGs), sehingga dimensi lingkungan menjadi pilar utama dalam kerangka keuangan berkelanjutan, yang diinterpretasikan dalam gambar 1.1.



Gambar 1.1: Mengelola *sustainable development*
Sumber: Schoenmaker (2017)

Ketiga dimensi ini – ekonomi, sosial, dan lingkungan – berfungsi sebagai pedoman dalam pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan, yaitu dengan memastikan pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa merusak generasi yang akan datang. Sehingga, ketiga dimensi ini menekankan pada pentingnya berinvestasi dalam proyek-proyek yang ramah lingkungan yang mempromosikan kemakmuran, inklusi sosial, dan mengurangi degradasi lingkungan (Morton et al., 2019). Selain itu, Schoenmaker (2017) juga mengembangkan kerangka kerja keuangan berkelanjutan untuk mengukur penggabungan tiga dimensi ini di dalam implementasi

keuangan berkelanjutan, seperti yang diuraikan dalam Tabel 1.1.

Tahap awal pengimplementasian keuangan berkelanjutan adalah seperti penggunaan keuangan secara umumnya, di mana nilai pemegang saham menjadi prioritas utama dalam menekankan profit tanpa memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Selanjutnya adalah SF 1.0, di mana perusahaan mulai mengadopsi praktik-praktik *sustainability*, tetapi fokus utama mereka tetap pada aspek ekonomi. Di dalam SF 2.0, perusahaan mulai mengintegrasikan tiga dimensi (orang, planet, profit) ke dalam proses bisnis mereka. Namun, fokus mereka sebagian besar pada meminimalkan

SF Typology	Value created	Ranking of factors	Optimization	Horizon
Finance as usual	Shareholder value	F	Max F	Short term
SF 1.0	Refined shareholder value	$F + S$ and E	Max F subject to S and E	Short term
SF 2.0	Stakeholder value (triple bottom line)	$I = F + S + E$	Optimize I	Medium term
SF 3.0	Common good value	S and E > F	Optimize S and E subject to F	Long term

Note: F = financial value; S = social impact; E = environmental impact; I = integrated value. At SF 1.0, the maximization of F is subject to minor S and E constraints.

Source: Schoenmaker (2017).

Tabel 1.1 Kerangka Kerja Tipologi Keuangan Berkelanjutan

dampak negatif yang dihasilkan, daripada secara proaktif mengantisipasi dampak lingkungan dan sosial yang lebih luas. Pada tahap akhir, SF 3.0, perusahaan telah mendapatkan legitimasi sosial untuk terus menjalankan proses bisnis mereka dikarenakan mereka secara efektif dan kolektif telah berkontribusi dalam mengatasi tantangan lingkungan dan sosial.

2. Definisi *Sustainable Finance*

Pengertian *sustainable finance*/keuangan berkelanjutan terkadang memiliki irisan dengan pengertian *business continuity* dalam aspek keuangan perusahaan dalam mengelola keberlanjutan lini bisnis. Namun, pengertian keuangan berkelanjutan memiliki arti yang lebih luas dari hanya sekedar perusahaan, seperti yang diutarakan oleh Ozili (2022), yang mengkonsolidasikan definisi keuangan berkelanjutan dari berbagai *scholars* dan standar internasional. Ozili (2022) menawarkan sebuah teori komprehensif me-

ngenai definisi keuangan berkelanjutan yang mengedepankan perilaku agen ekonomi, yang tersegmentasi menjadi enam proposisi yaitu: 1) *Priority theory*, yang menekankan mengenai pentingnya agenda prioritas keuangan berkelanjutan dalam strategi nasional, 2) *Peer emulation theory*, yang menyoroti praktik perbandingan pelaksanaan keuangan berkelanjutan berdasarkan *best practices*, 3) *Life span theory*, yang menekankan bahwa pasar akan mengikuti instrument produk terbaik dari keuangan berkelanjutan, 4) *Positive signalling theory*, yang menitikberatkan pada pengungkapan informasi positif tentang komitmen dalam mencapai tujuan keuangan berkelanjutan dan patuh terhadap agenda internasional, 5) *System disruption theory*, yang menekankan pada risiko yang muncul akibat perubahan kebijakan dengan mendukung mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, 6) *Resources theory*, yang mengakui bahwa setiap negara memiliki perbedaan level terhadap sumber daya,

terutama pada sumber daya manusia. Keenam pilar teoritis ini menguraikan dasar implementasi keuangan berkelanjutan yang menawarkan pendekatan terstruktur untuk mengintegrasikan pertimbangan ESG dalam pengambilan keputusan keuangan.

Meskipun teori Ozili memberikan kerangka kerja komprehensif yang mencakup dari sudut pandang yang luas, namun pengertian keuangan berkelanjutan ini belum cukup dalam mengenai aspek teknis dari berbagai definisi dan perdebatan seputar *financing*/ pembiayaan terkait perubahan iklim. Misalnya, Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC) mendefinisikan *climate finance* sebagai pendanaan yang diperoleh dari sumber-sumber publik, swasta, dan alternatif pendanaan lain dalam mendukung tindakan mitigasi dan adaptasi dari perubahan iklim. Di sisi lain, Noh (2019)

mendefinisikan beberapa konsep terkait keuangan berkelanjutan, seperti *carbon finance* – pendanaan proyek untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca, *green finance* – pendanaan proyek hijau yang dikhususkan untuk menghasilkan lingkungan yang lebih baik, dan *environmental finance* – pendanaan dan investasi dalam lingkungan ekologis. Variasi definisi ini diilustrasikan dalam Gambar 1.2. Oleh karena itu, makalah ini mengadopsi konsep yang lebih luas dengan menggunakan definisi *sustainable finance*/ keuangan berkelanjutan sebagai dasar teoritis dalam memberikan penjelasan komprehensif yang mencakup tidak hanya pendanaan proyek hijau tetapi juga keterkaitannya dalam pertimbangan ESG.

Namun, dalam praktiknya, definisi-definisi ini seringkali tumpang tindih dan merujuk pada konsep yang sama dalam pendanaan hijau yang bertujuan



Gambar 1.2 Hubungan antara Keuangan Berkelanjutan dengan Pendanaan lain terkait Perubahan Iklim
Sumber: Noh, (2014)

Pengembangan *common language* terkait pendanaan perubahan iklim dalam kerangka taksonomi hijau menyoroti kemajuan dalam bidang keuangan berkelanjutan. Debbarma & Choi (2022) menyelidiki tata kelola taksonomi hijau dan menemukan bahwa taksonomi hijau dapat mencakup beberapa aspek tata kelola dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk dari lembaga negara, pembuat kebijakan, komunitas adat, LSM, industri, dan kota dalam mencapai tujuan keberlanjutan yang disepakati secara global. Aspek tata kelola ini melibatkan: 1) *adaptive governance*, yang menyoroti strategi yang berkembang untuk mengelola dampak perubahan iklim pada sistem sosial; 2) *climate governance*, meliputi strategi, negosiasi, dan inisiasi yang didesain untuk mengarahkan sistem sosial sebagai respons terhadap perubahan iklim; 3) *ecological governance*, mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada semua tingkat pengambilan keputusan dan tindakan, dari individu hingga global; 4) *self-governance*, di mana individu memainkan peran signifikan dalam melindungi, mewujudkan, dan/atau mengelola ruang publik yang ramah lingkungan; 5) *energy governance*, yang melibatkan pengembangan dan implementasi standar untuk mencegah masalah terkait tindakan energi kolektif dalam skala besar; dan 6) *IT Governance*, yang mewakili kemampuan organisasi untuk menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Keenam aspek tata kelola ini menunjukkan bahwa taksonomi hijau memiliki po-

tensi dalam menggunakan *common language* yang dicapai sebagai ‘hijau’ yang diakui bersama dalam suatu tatanan sosial dalam hal pendanaan perubahan iklim, mengingat berbagai dimensi tata kelola yang terlibat dalam inisiatif keuangan berkelanjutan dalam taksonomi hijau. Namun, taksonomi hijau masih dalam tahap awal pengembangan, sehingga implementasi masih terbatas pada pengukuran dampak terhadap perubahan iklim.

3. Prinsip *Sustainable Finance*

Prinsip-prinsip *sustainable finance*/ keuangan berkelanjutan berasal dari landasan teori yang menggabungkan antara elemen lingkungan, sosial and ekonomi yang tercakup di dalam dimensi ESG. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai kerangka panduan keuangan berkelanjutan dalam mengintegrasikan pertimbangan ESG ke dalam pengambilan keputusan (Boffo & Patalano, 2020). Schoenmaker & Schramade (2019, hal. 20) berpendapat bahwa keuangan berkelanjutan dapat mengoptimalkan dampak pada tiga tingkatan: ekonomi, masyarakat, dan lingkungan, tanpa mengorbankan satu sama lain. Sehingga prinsip keuangan berkelanjutan ini menantang model neoklasik yang hanya bergantung pada harga pasar sebagai sinyal utama dalam pengambilan keputusan, dengan tanpa memperhatikan eksternalitas sosial dan lingkungan (Dolderer et al., 2020). Eksternalitas, termasuk biaya sosial dan lingkungan, tidak sepenuhnya mencerminkan harga

pasar, yang dapat mencakup dampak negatif seperti polusi udara, penggundulan hutan, dan ketidaksetaraan sosial. Karena model keuangan konvensional sering mengabaikan eksternalitas ini, keuangan berkelanjutan mencoba untuk mengatasi ketidakseimbangan ini dengan memasukkan pertimbangan ESG dalam pengambilan keputusan.

Dalam menanggapi persoalan ini, Schoenmaker & Schramade (2019) berpendapat bahwa eksternalitas tersebut dapat diatasi secara efektif melalui intervensi pemerintah (melalui regulasi dan pajak) dan intervensi organisasi internasional (melalui standar internasional). Mereka memainkan peran instrumental tidak hanya dalam mengakui eksternalitas, tetapi juga dalam memfasilitasi praktik-praktik yang dapat menggantikan eksternalitas ini dalam sistem keuangan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan menyediakan pendekatan terpadu untuk menggabungkan eksternalitas ke dalam harga pasar, sehingga menciptakan nilai nyata, yang dapat diperkuat lebih lanjut oleh intervensi pemerintah dan keselarasan dengan agenda internasional.

Organisasi internasional, sebagai inisiator pertama, memiliki peran yang signifikan dalam mempromosikan keuangan berkelanjutan dan mendorong pemerintah di seluruh dunia untuk mengintervensi kebijakan perubahan iklim melalui berbagai forum internasional. Tindakan kolektif ini bertujuan untuk memiliki satu visi dalam memitigasi

dampak perubahan iklim dengan target membatasi kenaikan suhu global di bawah 1.5°C pada tahun 2030, dan memperoleh emisi *net-zero* pada tahun 2050, sebagaimana yang tertuang dalam the Paris Agreement tahun 2015. Sebagai hasilnya, beberapa organisasi internasional telah mengembangkan beberapa *voluntary standards* dan prinsip pada keuangan berkelanjutan, dengan memberikan *guidelines* kepada negara dan institusi keuangan untuk mengikuti prinsip dan standar internasional tersebut. Tabel 1.2 menunjukkan beberapa prinsip keuangan berkelanjutan dari organisasi.

Menurut Aditya (2023), elemen utama dalam prinsip keuangan berkelanjutan dari organisasi internasional tersebut meliputi: 1) berfokus pada nilai jangka panjang, 2) memfasilitasi tata kelola yang efektif, dan 3) mendorong *integrated reporting*. Sehingga dengan ketiga poin utama prinsip keuangan tersebut menjadi acuan bagi organisasi dalam menerapkan keuangan berkelanjutan. Khusus di poin ketiga, Schoenmaker and Schramade (2019) menggarisbawahi bahwa terdapat kebutuhan mendesak bagi korporasi untuk menyiapkan *integrated reporting* yang tidak hanya merefleksikan keadaan performa keuangan melainkan juga dampak dari lingkungan dan masyarakat sekitar. Sejalan dengan itu, Ozili (2022) mengkategorikan prinsip keuangan berkelanjutan ke dalam dua tipe dasar: 1) prinsip yang menggabungkan faktor-faktor ESG, dan 2) prinsip yang memenuhi kebutuhan perekonomian

No	Organisasi Internasional	Standard
1	Principle of Responsible Investment (PRI)	Organisasi ini menerapkan enam kunci prinsip utama sebagai <i>guidance</i> untuk para investor dalam mensinergikan ESG ke dalam proses bisnis perusahaan: 1) mengintegrasikan ESG ke dalam analisis investasi; 2) mengintegrasikan ESG ke dalam kebijakan <i>ownership</i> ; 3) pengungkapan ESG dari entitas yang berinvestasi; 4) promosi ESG dalam industri investasi; 5) kolaborasi industri untuk penerapan ESG yang efektif; 6) <i>integrated reporting</i> dalam implementasi ESG
2	The International Capital Market Association (ICMA)	Berfokus pada empat komponen dalam prinsip <i>green bond</i> , seperti 1) <i>use of proceeds</i> , 2) <i>process for project evaluation and selection</i> , 3) <i>management of proceeds</i> , 4) <i>reporting</i> . Prinsip ini juga menekankan pentingnya <i>external review</i> dalam penerbitan <i>green bond</i> .
3	International Finance Corporation (IFC)	Terdapat enam prinsip keuangan berkelanjutan, meliputi 1) membangun pentingnya kapabilitas dan pengetahuan; 2) penguatan instrumen keuangan berkelanjutan; 3) keikutsertaan <i>stakeholder</i> yang terlibat; 4) mengelola risiko perubahan iklim; 5) penerapan prinsip keberlanjutan pada kegiatan internal dan operasional bank; dan 6) <i>reporting</i>

Tabel 1.2 Prinsip Keuangan Berkelanjutan dari beberapa Organisasi Internasional
 Sumber: Website dari setiap organisasi internasional (2023)

jangka panjang. Oleh karena itu, prinsip keuangan berkelanjutan mendorong kerja sama antar semua sektor ekonomi, dengan mendorong tindakan kolektif menuju *sustainable development goals*.

C. Kesimpulan

Perubahan iklim menjadi tantangan serius di abad ini, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Transisi ke energi hijau dan ramah lingkungan merupakan suatu keniscayaan yang memerlukan investasi yang besar, yang tidak dapat hanya bergantung pada sumber dana publik. Peran sektor swasta dalam *sustainable finance* atau keuangan berkelanjutan menjadi semakin penting dalam mendukung perubahan ini.

Diskursus utama keuangan berkelanjutan dimulai dari stan-

dar internasional, dengan eksplorasi yang terbatas mengenai dasar teoritis dalam bidang ini. Studi literatur menunjukkan perkembangan konsep keuangan berkelanjutan dari waktu ke waktu. Dari fokus awal hanya pada profit, konsep ini berkembang menjadi pendekatan yang lebih inklusif, yang memasukkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam pengambilan keputusan finansial. Berbagai pandangan dan teori mencerminkan evolusi ini.

Dalam keseluruhan konteks ini, keuangan berkelanjutan menjadi instrumen penting dalam mitigasi perubahan iklim dan masalah sosial. Dengan kerja sama yang baik antara sektor publik dan swasta, kita dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan.

PERAN INTERNAL AUDITOR DALAM MENGAWAL PENGELOLAAN RISIKO REPUTASI BUMN

Daryanto

Auditor Ahli Utama di Deputy Bidang PIP Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

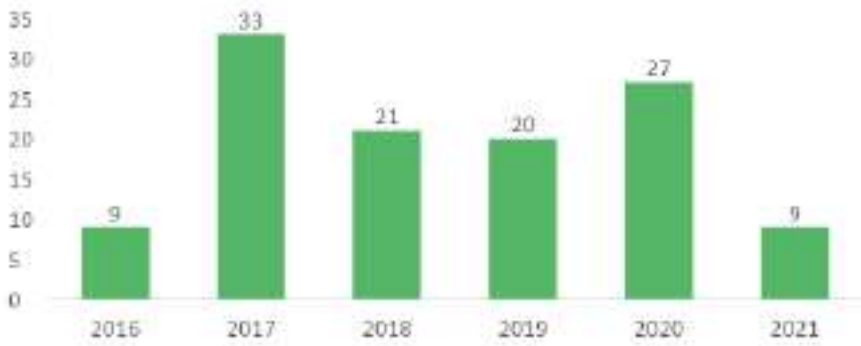
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran sebagai penggerak ekonomi untuk Indonesia, dimana peran itu mencakup: (a) Pengelola korporasi berskala global; (b) Akselerator proyek strategis nasional dan (c) Pemberdayaan dan pelibatan Masyarakat. BUMN saat ini juga berada pada kondisi:

- Memiliki aset sebesar Rp8.978,1 triliun (naik 838% dari tahun 2020)
- Memiliki pendapatan sebesar Rp2.292,5 triliun (naik 18% dari tahun 2020)
- Memiliki lebih dari 1 juta pekerja BUMN dan anak usaha.

Dengan kondisi tersebut, BUMN memiliki peran yang sangat strategis hingga di masa mendatang, sehingga segala risiko dan tantangan yang ada harus dicermati dengan seksama dan dihadapi dengan baik agar

peran tersebut dapat terus berjalan secara optimal. Salah satu risiko yang perlu dicermati adalah risiko reputasi. Budianta (2019), menjelaskan bahwa dalam menjalankan organisasi, tentu semua risiko adalah hal yang signifikan untuk dicermati, tetapi risiko terjadinya kerusakan reputasi dapat memiliki efek yang dahsyat terhadap organisasi, karena reputasi merupakan bagian dari asset organisasi.

Menurut data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) tahun 2022, menunjukkan bahwa terdapat 119 kasus korupsi di lingkungan BUMN selama periode 2016-2021 dengan jumlah kerugian negara diperkirakan Rp47,92 triliun. Kasus korupsi ini melibatkan jumlah tersangka tak kurang dari 340 orang. Adapun jumlah korupsi yang terjadi per tahun sejak 2016 hingga 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 1.1 Jumlah Kasus Korupsi di Lingkungan BUMN (2016-2021)
Sumber: Diolah dari ICW (2022)

Beberapa fenomena kasus korupsi sebagaimana dikutip dari berbagai sumber di antaranya sebagai berikut:

- Dugaan korupsi **penyimpangan dan penyelewengan dana** PT Waskita Beton Precast (2016-2020). Kerugian negara mencapai Rp2,5 triliun.
- Dugaan korupsi **pengadaan** gas alam cair/Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (2011-2021) yang merugikan negara sebesar Rp2,1 triliun
- Dugaan **fraud (kecurangan)** sehingga terjadi gagal bayar polis asuransi di PT Jiwasraya, yang dinilai merugikan negara hingga Rp16,81 triliun
- Dugaan **penyelewengan jabatan** dan korupsi di PT Antam, yang merugikan negara hingga Rp100,7 miliar
- Dugaan korupsi dalam **penjualan dan pemasaran** di PT Dirgantara Indonesia (DI) sejak 2007-2017. Kerugian mencapai Rp330 miliar.
- Dugaan korupsi **proyek Blast Furnace Complex (BFC)** di PT Krakatau Steel Tbk tahun 2011, diduga merugikan negara Rp6,9 triliun.
- Korupsi **penyelewengan dana investasii** PT ASABRI, yang melibatkan Benny Tjokrosaputro PT Hanson Internasional, merugikan negara Rp 23,7 triliun.
- Kasus *fraud* di PT Garuda Indonesia atas **pengadaan pesawat** CRJ-1000 dan ATR 72-600, merugikan negara Rp8,8 triliun.
- Kasus korupsi terbaru proyek Tol MBZ, diduga merugikan negara kurang lebih Rp1,5 triliun.

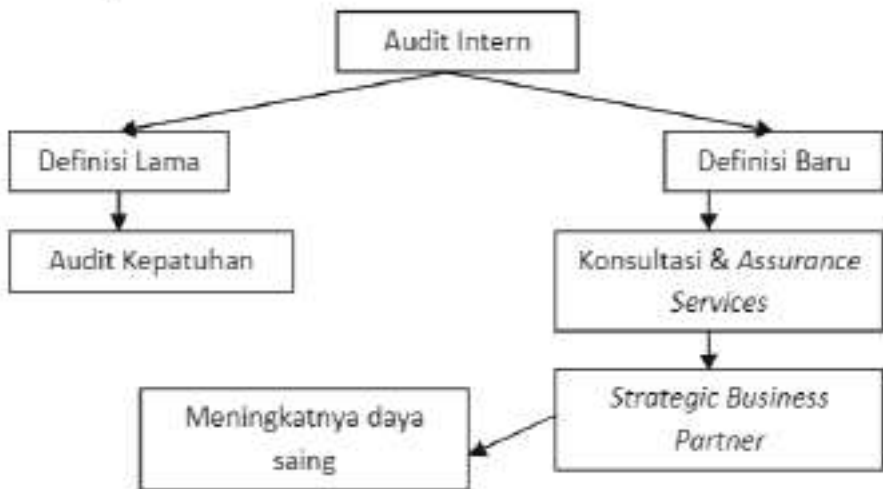
Dengan masih banyaknya kasus korupsi di BUMN ini, tentu banyak pihak yang merasa prihatin dan khawatir terutama terhadap menurunnya reputasi BUMN di mata masyarakat.

Peran *Internal Auditor* sebagai *Strategic Business Partner*

Dalam menghadapi dinamika global di era disrupsi ini, Osakwe dalam laman Forbes (2023) menekankan bahwa internal auditor perlu menjawab tantangan tersebut dengan melakukan reposisi sebagai *strategic business partner*. Internal auditor pemerintah didorong untuk menjadi *strategic business partner*, agar dapat berkolaborasi dengan seluruh lini manajemen (*lines of model*), termasuk dalam hal mengidenti-

fikasi berbagai risiko, khususnya risiko reputasi. Lebih lanjut lagi, internal auditor juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang tepat dan terukur untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan secara dini, terlebih dalam menghadapi ancaman dan situasi terganggunya reputasi BUMN.

Hidayat (2011) merumuskan kerangka pemikiran tentang peran audit intern sebagai *strategic business partner* dalam gambar sebagai berikut:



Peran Audit Intern sebagai *Strategic Business Partner*
Sumber: Hidayat (2011)

Gambar di atas, memperlihatkan bahwa peran Audit Intern sebagai *strategic business partner* dapat meningkatkan daya saing dari lembaga/Perusahaan tersebut. Edratna (2008) menyatakan bahwa peran Auditor Intern sebagai *strategic business partner* akan terlihat ketika mereka dapat memposisikan dirinya sebagai mitra sejajar dari pimpinan tinggi (*Top*

Executive) perusahaan guna menghasilkan kinerja perusahaan yang lebih baik. Auditor Intern juga menjadi partner diskusi dalam rangka menemukan solusi terbaik atas berbagai permasalahan.

Yaqoob dalam laman LinkedIn (2023) memberikan eksplorasi peta jalan (*road map*) bagaimana internal audit dapat bertransformasi menjadi *strategic business*

partner, yang tahapannya tampak sebagai berikut:

1. **Identifikasi kondisi saat ini:** Di tahap ini, lakukan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, threat*) untuk mengetahui kondisi yang ada;
2. **Tentukan visi:** Tahap ini yaitu membuat visi yang mencakup pembuatan *objektif, goal* dan dampak (*outcomes*) yang diharapkan;
3. **Buat rencana strategis (*strategic plan*):** Dalam tahap ini, dibuat rencana strategis untuk mencapai visi yang telah ditentukan. Dalam membuat rencana strategis ini harus juga memperhatikan waktu, anggaran biaya dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan;
4. **Bangun hubungan baik:** Di sini difokuskan untuk membangun hubungan kolaboratif dengan manajemen dan *stakeholder* terkait;
5. **Fokus pada nilai tambah:** Sebagaimana terlihat di gambar di atas bahwa peran *strategic business partner* adalah untuk meningkatkan daya saing;
6. **Bangun pendekatan berbagai risiko:** Buat prioritasi aktivitas audit dari yang memiliki risiko tertinggi hingga terendah;
7. **Investasi pada talenta:** *Training*, sertifikasi dan kesempatan untuk peningkatan kapasitas/*skill* lainnya menjadi poin penting dalam tahap ini;
8. **Tingkatkan adopsi teknologi:** Untuk meningkatkan efisiensi dan memudahkan proses kerja audit;

9. **Ukur kinerja:** Lakukan evaluasi secara berkala.

Dengan melakukan tahapan peta jalan di atas, diharapkan internal auditor dapat berkontribusi sebagai *strategic business partner* yang efektif. Internal auditor juga harus terus melakukan inovasi, di antaranya melalui penguatan *organizational learning culture* (OLC) dimana menurut Achdiat, et al (2023), OLC memiliki peran signifikan dalam mendukung inovasi di internal audit. Selain itu, untuk mendukung hal tersebut, maka Internal Auditor harus mampu: (a) bersikap kooperatif dan kondusif dalam menyelesaikan masalah, (b) memberikan solusi konstruktif terhadap berbagai masalah yang dihadapi *auditee*, dan (c) mencegah secara dini berbagai kecurangan atau tindakan tidak etis oleh oknum perusahaan.

Manajemen Risiko dan Penerapannya

Menurut Zunaedi, Annisa & Dewi (2022), fungsi internal audit harus terus berevolusi menuju tingkat audit berbasis risiko (*risk-based*) yang lebih tinggi, agar manajemen risiko dapat berjalan lebih efektif. Sebagai Auditor Intern Pemerintah sudah seharusnya mereposisi dan mendefinisikan perannya untuk mendorong terwujudnya Sistem Pengawasan Nasional yang efektif. Kondisi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pemberantasan KKN, meningkatkan penerimaan negara, dan mendorong terwujudnya *Good Governance* baik sek-

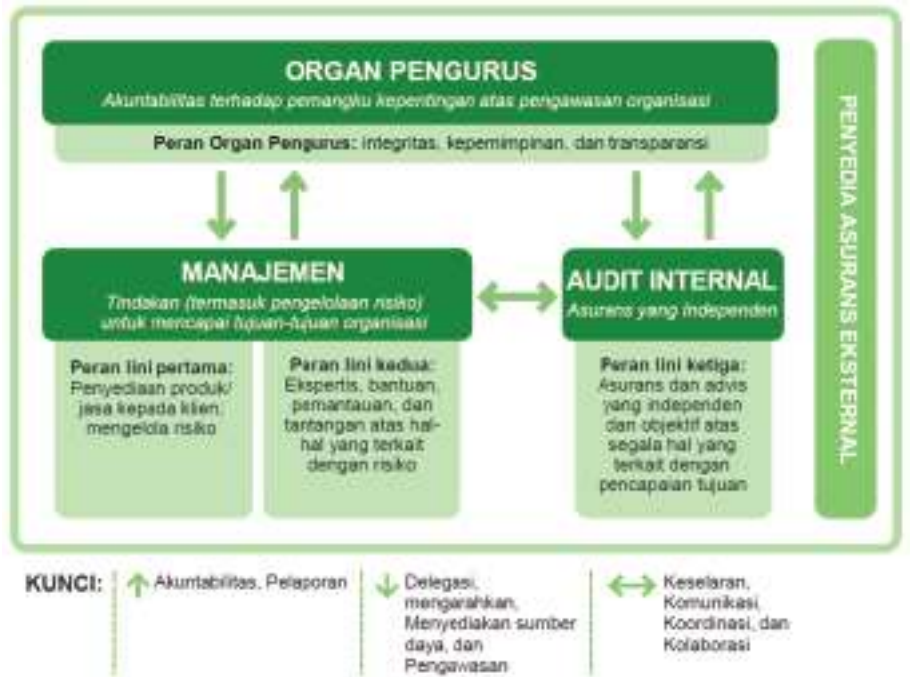
tor pemerintah maupun korporat. Dalam konteks ini, internal auditor menciptakan nilai yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) melalui produk yang dihasilkan berupa Manajemen Risiko (MR).

Selanjutnya, menurut *Institute of Internal Auditor/IIA* (2023), *risk* (*risiko*) adalah kemungkinan suatu hal terjadi yang dapat berdampak terhadap pencapaian objektif Perusahaan. Dalam studi ini, selaras dengan definisi IIA tersebut, risiko didefinisikan segala kemungkinan kejadian yang akan berdampak negatif pada pencapaian tujuan. Risiko diukur dalam besaran konsekuensi atau dampak, termasuk tingkat kemungkinan terjadinya. Oleh sebab itu diperlukan manajemen risiko yang se-

cara umum didefinisikan sebagai budaya, proses dan struktur yang diarahkan untuk mengelola risiko melalui optimalisasi potensi peluang dan meminimalkan dampak negatifnya. Adapun *compliance* (kepatuhan) menurut Sadiq dan Governatori (2015) merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa proses, operasi dan praktik bisnis berjalan sesuai norma atau kode etik yang berlaku. Kepatuhan akan memastikan bahwa organisasi mengikuti semua kewajiban yang telah ditetapkan, sehingga organisasi dapat beroperasi sesuai batas-batas yang telah ditentukan.

Three Lines Model

Merupakan *model* yang dikembangkan oleh *the Institute of Inter-*



Three Lines Model IIA
Sumber: SPI UNDIP (2021)

nal Auditor/IIA (2020) yang menggambarkan dinamika aktivitas perusahaan yang membedakan antara fungsi-fungsi bisnis sebagai pemilik risiko terhadap fungsi pengelola risiko (*managing risks*), fungsi pengawas risiko (*overseeing risks*) dan fungsi penyedia asuransi independen (*independent assurance*). Adapun model ini dapat dilihat pada gambar di samping.

Berdasarkan gambar dari SPI UNDIP (2021) di samping, peran lini ketiga di dalam *The Three Lines Model* dijalankan oleh auditor intern perusahaan (i.e. BUMN), yaitu: menjaga akuntabilitas utama organ pengurus dan independensinya terhadap pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Peran ini termasuk menjalankan tugas penjaminan / *assurance* dan konsultasi/ *advis* yang independen dan objektif kepada manajemen dan organ pengurus mengenai kecukupan dan efektivitas GRC dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Pada sisi kanan gambar ini juga terlihat unsur penyedia asuransi eksternal yang dalam konteks makalah ini adalah peran dan fungsi internal auditor untuk mengawasi dan mengawal manajemen risiko di BUMN.

Analisis Terkait *Current Issues* reputasi BUMN

Berdasarkan ulasan kondisi maupun teori yang telah disampaikan sebelumnya, menunjukkan pemahaman bahwa risiko yang diakibatkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat maupun *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif

terhadap apa saja yang berkaitan dengan produk, jasa, simbol, lambang, atau nama perusahaan, disebut sebagai risiko reputasi. Sumber risiko bisa berasal dari internal maupun eksternal perusahaan yang berpotensi merugikan reputasi perusahaan, misalnya: pemberitaan negatif di media massa, keluhan pengguna produk atau jasa, atau pelanggaran etika bisnis akibat lemahnya integritas para pengelola perusahaan.

Biaya yang besar itu bukan hanya untuk mengembalikan reputasi perusahaan, tetapi mungkin juga untuk membayar denda yang dijatuhkan oleh pengadilan sebagai konsekuensi terjadinya tindak kecurangan di perusahaan itu. Kasus seperti ini dialami oleh Vetco International Ltd., dimana untuk memenangkan kontrak di Nigeria, tiga anak perusahaannya diduga memberikan suap kepada otoritas setempat, dan oleh Pengadilan negara setempat mereka dijatuhi hukuman denda sebesar 26 juta USD karena terbukti melanggar *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA).

Peran Internal Auditor dalam Mengawal Risiko Reputasi di BUMN

Harus disadari bahwa runtuhnya reputasi BUMN bukan hanya dipengaruhi oleh satu kejadian negatif berupa kasus korupsi, namun banyak faktor lain yang turut mempengaruhi tergerusnya reputasi perusahaan, misalnya: buruknya pelayanan, rendahnya mutu produk atau jasa yang tidak sepadan dengan harga produknya, dan sebagainya. Namun,

kasus korupsi atau pelanggaran etika bisnis – sekalipun baru pada posisi kabar berita di media dan belum diputus inkrach oleh pengadilan – tetap saja korupsi dianggap sumber penyakit runtuhnya reputasi sebuah entitas, bahkan kasus korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Di sisi lain, menguatnya reputasi dapat berdampak positif bagi pihak internal maupun eksternal. Pihak internal adalah: pemilik perusahaan maupun pengelola perusahaan i.e. karyawan dan pimpinannya, sedangkan pihak eksternal adalah: pelanggan, mitra kerja, dan pihak-pihak yang berkepentingan di luar pemilik dan pengelola perusahaan. Gambaran sederhana sebagai contoh atas pengaruh kuat dan lemahnya reputasi perusahaan yang menyangkut karyawan sebagai pihak internal adalah ketika reputasi perusahaan meningkat, maka akan timbul rasa bangga bekerja untuk perusahaan dan dapat memacu semangat kerja yang lebih kuat. Demikian juga bagi pihak eksternal – i.e. pelanggan atau mitra kerja – mereka akan lebih percaya jika membeli produk dan/atau ketika mereka bekerja sama dengan perusahaan yang memiliki reputasi tinggi ini, bahkan ketika mendengar nama produk, atau memegang logo, tanda, atau simbol khas perusahaan saja, mereka dapat merasakan adanya ‘aura kebaikan’ yang membanggakan atas produk perusahaan tersebut.

Membangun reputasi BUMN melalui tindakan *constructive* atau

semangat membangun, merintis, serta mempertahankan reputasi, adalah jauh lebih sulit dibanding dengan tindakan *destructive* berupa tindakan yang bersinggungan dengan pengrusakan reputasi BUMN baik dilakukan secara sengaja ataupun kelalaian. Membangun dan mempertahankan reputasi – apalagi memulihkan reputasi yang sudah terlanjur terpuruk – memerlukan energi dan sumber daya (*resources*) yang tidak sedikit, bahkan memerlukan waktu panjang. Hal inilah yang harus disadari oleh para pengelola BUMN, pemegang saham pemerintah, maupun pemangku kepentingan lainnya, tidak terkecuali Auditor Intern Pemerintah.

Selanjutnya, menurut studi literatur disebutkan bahwa mengelola risiko haruslah dilakukan secara menyeluruh (*comprehensive*) mengacu pada prinsip dan cakupan manajemen risiko. Secara umum, upaya-upaya internal auditor dalam mengawal BUMN ini sudah sejalan dengan konsep *three lines model* yang berada di sisi kanan dari tiga unsur lini pertahanan internal perusahaan di mana organ manajemen BUMN lengkap dengan unit audit internalnya sebagai lini ketiga diperkuat dengan penyedia asuransi eksternal.

Strategi dan Tindakan yang Dilakukan Internal Auditor

Internal auditor dapat memainkan peran penting dalam konteks mengawal risiko reputasi BUMN yang mencakup beberapa aspek, sebagai berikut:

- 1. Pengawasan Keuangan dan Kinerja:** internal auditor

bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap keuangan dan kinerja BUMN, yaitu dengan memastikan bahwa manajemen keuangan BUMN dilaksanakan dengan baik dan transparan (*governance*). Ini termasuk memeriksa penggunaan dana secara efisien, mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan memastikan bahwa BUMN mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku (*comply*).

2. **Audit dan Evaluasi:** internal auditor melakukan audit dan evaluasi terhadap BUMN untuk menilai kepatuhan mereka terhadap ketentuan hukum dan peraturan serta efektivitas pengelolaan. internal auditor akan mengevaluasi apakah BUMN menjalankan kegiatan mereka dengan integritas, profesionalisme, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*governance, control & compliance*). Hasil audit dan evaluasi ini dapat membantu BUMN untuk memperbaiki kelemahan dan meningkatkan praktik-praktek terbaik.
3. **Pencegahan dan Penanganan Masalah:** internal auditor juga berperan dalam pencegahan dan penanganan masalah di BUMN, yaitu dapat memberikan rekomendasi dan saran kepada manajemen BUMN dalam menghadapi tantangan yang dapat berdampak negatif terhadap reputasi perusahaan. Misalnya,

jika ada temuan atas kecurangan atau praktik yang merugikan negara atau melanggar hukum, internal auditor dapat memberi rekomendasi perbaikan dan memastikan tindakan yang diambil oleh BUMN adalah tepat dan cepat (*responsive*) untuk mengatasi masalah tersebut.

4. **Pelaporan dan Transparansi:** internal auditor juga berperan dalam melaporkan temuan pengawasan dan audit kepada pihak terkait, termasuk pemerintah dan pemangku kepentingan BUMN (Direksi, Menteri BUMN, Menteri Keuangan sebagai Pemegang Saham Pemerintah, dan Presiden RI). Dalam menjaga reputasi BUMN, internal auditor akan memastikan bahwa laporan yang disampaikan memuat informasi yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan agar para pemangku kepentingan memperoleh pemahaman yang jelas, relevan dan memadai tentang kinerja BUMN dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kelemahan.

Secara keseluruhan, internal auditor sebagai lembaga pengawas internal pemerintah dalam konteks menjaga risiko reputasi BUMN adalah bertugas memastikan bahwa BUMN menjalankan kegiatannya melalui prinsip tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*). Internal auditor juga berperan mendorong agar BUMN dikelola secara efisien,

akuntabel, dan taat hukum (*compliance*). Melalui pengawasan dan audit yang tepat, internal auditor dapat membantu mencegah praktik-praktik tidak etis yang berpotensi merugikan negara dan merusak reputasi BUMN.

Untuk memastikan kecukupan kualitas hasil pengawasan dalam konteks pengawalan risiko reputasi di BUMN, perlu membangun kerja sama, sinergi dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, antara lain: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), hingga Aparat Penegak Hukum (APH) jika dipandang perlu untuk melibatkannya. Kemudian, juga perlu mengantisipasi kebutuhan akan tenaga ahli bidang hukum (*legal aspect*) serta tenaga-tenaga ahli lainnya dengan memperhitungkan kebutuhan penugasan dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan baik menyangkut perubahan lingkungan maupun kebijakan pemerintah.

Terakhir, selain bermodalkan peneguhan Nilai 'AKHLAK' BUMN yaitu: Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif atau disingkat AKHLAK, perlu mengingatkan kepada Kementerian BUMN untuk memperkuat juga budaya kerja yang memposisikan semua karyawan BUMN menjadi "duta reputasi" (*reputation-ambassador*)

bagi perusahaan atau BUMN tempat di mana para karyawan ini bekerja. Melalui gerakan penguatan budaya kerja dan sadar budaya seperti ini tugas internal auditor pun akan diringankan karena potensi penyimpangan dan penyelewengan maupun perilaku tidak etis akan semakin berkurang. Melalui langkah-langkah seperti tersebut di atas maka tujuan utama terkait upaya-upaya memperkuat pengawalan risiko reputasi di BUMN diharapkan dapat berjalan secara efisien dan efektif.

SIMPULAN

Internal auditor memiliki peran strategis dalam menjaga reputasi BUMN yang mencakup beberapa aspek, yaitu: aspek pengawasan keuangan dan kinerja, aspek audit dan evaluasi, aspek pencegahan dan penanganan masalah, aspek pelaporan dan transparansi.

Dalam konteks menjaga reputasi BUMN, internal auditor dapat memastikan bahwa BUMN menjalankan kegiatannya dengan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabel. Internal Auditor berperan mendorong pihak yang berkepentingan agar BUMN dapat dikelola secara efisien. Melalui pengawasan dan audit yang tepat, dapat membantu mencegah praktik-praktik korupsi dan penyelewengan wewenang yang berpotensi merugikan negara serta berdampak pada potensi merusak reputasi BUMN.